

**ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
KETIMPANGAN DI 10 PROVINSI DENGAN IPM TERTINGGI DI
INDONESIA
SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Wulan Maolinda
No Mahasiswa : 21313107
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
KETIMPANGAN DI 10 PROVINSI DENGAN IPM TERTINGGI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Wulan Maolinda
No Mahasiswa : 21313107
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

Pernyataan Bebas Plagiarism

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh - sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Maret 2025

Penulis,



Wulan Maolinda

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Di 10 Provinsi Dengan IPM Tertinggi Di Indonesia

Nama	: Wulan Maolinda
Nomor Mahasiswa	: 21313107
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



(Akhsyim Afandi Drs. MA.Ec., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN DI 10 PROVINSI
DENGAN IPM TERTINGGI DI INDONESIA**

Disusun oleh : WULAN MAOLINDA

Nomor Mahasiswa : 21313107

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 15 April 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Penguji : Mustika Noor Mifrahi, S.E.I.,M.E.K.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk kedua orang tua tersayang, cinta pertama penulis, Bapak Endi Susandi terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dengan cara yang tak ternilai. Meski tak banyak bicara dan sering kali gengsi menunjukkan kasih sayang, setiap tindakannya adalah bukti cinta yang tak terucap, tetapi selalu terasa. Dan pintu surgaku, Ibunda Ani Kurniati tercinta, yang tiada henti melangitkan doa demi setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam setiap kegelapan, memberikan motivasi di saat ragu, serta dukungan finansial, fasilitas, dan nasihat penuh kasih hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk adikku, Intan Anggraeni, semoga ini menjadi motivasi bahwa mimpi bisa dicapai dengan usaha dan doa. Tanpa kalian, penulis tidak akan sampai di titik ini. Semoga Bapak, Ibu, dan adik senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan ini. Tidak ada yang terwujud tanpa kehendak-Nya, tanpa kasih sayang-Nya yang tak terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Di 10 Provinsi Dengan IPM Tertinggi Di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik tanpa suatu halangan apapun.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Perjalanan penulis dalam menempuh studi dan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan serta semangat dari berbagai pihak yang senantiasa selalu berada di sisi peneliti baik dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terbilang kepada :

1. Bapak Endi Susandi dan Ibu Ani Kurniati, terima kasih atas cinta, doa, serta perjuangan yang tak terhitung untuk penulis. Terima kasih telah percaya dan selalu menjadi tempat berpulang di setiap langkah perjalanan ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang agar bisa melihat setiap pencapaian anaknya.
2. Intan Anggraeni, terima kasih telah menjadi adik yang selalu menghibur dan memberi semangat di setiap perjalanan ini. Semoga kita selalu kompak, saling mendukung sampai meraih kesuksesan bersama dan membanggakan orang tua.
3. Bapak Akhsyim Afandi Drs. MA.Ec., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, mendampingi, dan membimbing serta memberikan inspirasi dalam pelaksanaan penulisan hingga selesai penyusunan skripsi. Penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan Bapak, semoga Allah SWT melindungi dan memberikan kesehatan kepada Bapak dan keluarga.
4. Bapak Prof Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan

Ekonomika Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran fakultas.

5. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D., selaku Ketua Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, beserta dosen dan jajarannya.
6. Rino Rizaldy, terima kasih telah menjadi pendorong terbesar dalam perjalanan skripsi ini, bahkan sering kali terasa seperti kerja rodi dibawah pengawasan “mandor skripsi”. Terima kasih telah tanpa lelah mendorong, mengingatkan, dan memastikan penelitian ini selesai dengan baik. Dukunganmu, meskipun sering datang dalam bentuk paksaan halus (atau keras), adalah salah satu alasan penulis dapat terus melangkah. Penulis menyadari bahwa semua itu dilakukan demi kebaikan dan pencapaian yang lebih baik. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi keluh kesah dan drama selama proses ini, telah menjadi rumah yang selalu tenang, dan semangat terus dalam mencapai mimpi-mimpi mu.
7. My best partner Deffani Zulfa Aulia Dachman, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi dan menghadapi sidang komprehensif. Meski terkadang cuek dan menyebalkan, kehadiranmu selalu membawa arti. Dari drama besar sampai hal-hal receh, semua itu menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga kita tetap berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan terus mengingat bahwa kita pernah berjuang bersama.
8. Kepada Siti dan Ainaya. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi support kepada penulis karya ilmiah ini.
9. Untuk banyak pihak yang telah membantu, mendoakan, serta memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah dilakukan. Semoga Allah SWT selalu mempermudah urusan kalian.
10. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri, Wulan Maolinda. Anak pertama yang berumur 21 tahun yang keras kepala, tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Perjalanan

menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Terima kasih dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Kamu hebat, saya bangga kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini. Meskipun air mata dan kegelisahan datang menghampiri, kamu tetap bertahan bahkan saat jalan terasa begitu berat. Terima kasih ya sudah hadir di dunia dan sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, wulan. Rayakan lah selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu berada.

Penulis menyadari bahwa manusia tentu tidak luput dari kesalahan maka penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca sehingga dapat membangun dan membawa manfaat bagi semua bagian dari skripsi *Aamiin YRA*.

Yogyakarta, 09 Maret 2025

Penulis,

Wulan Maolinda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan	19
2.2.2 Simon Kuznets.....	22
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	24
2.2.4 Penetrasi Internet	25
2.2.5 Pengertian Pengeluaran Pemerintah	26
2.2.6 Dana Alokasi Umum (DAU).....	28
2.2.7 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	29
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Hipotesis Penelitian	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.2 Definisi Variabel.....	31
3.3 Variabel Terikat (Dependensi).....	31
3.4 Variabel Bebas (Independen)	32
3.5 Metode Analisis	33
3.6 Pendekatan Regresi Data Panel.....	34
3.6.1 Model Common Effect (CEM).....	34

3.6.2	Model Fixed Effect (FEM)	34
3.6.3	Model Random Effect (REM).....	35
3.7	Pemilihan Model	35
3.7.1	Uji Chow.....	35
3.7.2	Uji Hausman.....	36
3.8	Uji Lagrange Multiplier	36
3.9	Uji Hipotesis	37
3.9.1	Uji Parsial t	37
3.9.2	Uji Simultan f	37
3.9.3	Koefisien Determinasi (R^2)	38
BAB IV		39
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	39
4.2	Hasil Analisis Regresi.....	41
4.2.1	Pengujian Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).....	41
4.3	Pemilihan Model Terbaik.....	42
4.3.1	Uji Chow.....	42
4.3.2	Uji Hausman.....	43
4.4	Model Terbaik	44
4.4.1	Model Random Effect	44
4.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	45
4.6	Pengujian Statistik	45
4.6.1	Uji Simultan (Uji F)	45
4.6.2	Uji Parsial (Uji t)	45
4.7	Interpretasi dan Pembahasan	48
4.7.1	Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	48
4.7.2	Variabel Penetrasi Internet (PNET)	49
4.7.3	Variabel Government Spending Pendidikan (PEND)	50
4.7.4	Variabel Pengeluaran Pemerintah Kesehatan (KES)	51
4.7.5	Variabel Pengeluaran Pemerintah Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU)	52

4.7.6	Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)	53
4.7.7	Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)	54
BAB V		55
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Implikasi	56
5.3	Keterbatasan	57
5.4	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 10 Provinsi dengan IPM Tertinggi di Indonesia	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. 2 Patokan Nilai Koefisien Gini.....	20
Tabel 2. 3 Pengukuran IPM.....	24
Tabel 2. 4 Karakteristik Pengguna Internet di Indonesia 2023	25
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	39
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Pengujian CEM, FEM, dan REM.....	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow	43
Tabel 4. 4 Uji Hausman.....	43
Tabel 4. 5 Model Terbaik Random Effect Model	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 34 Provinsi di Indonesia	2
Gambar 1. 2 Data Rasio Gini 10 Provinsi dengan IPM Tertinggi.....	5
Gambar 2. 1 Kurva Lorenz.....	21
Gambar 2. 2 Kurva Kuznets	23
Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 data variabel dependen dan independen 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia periode 2010-2023	63
Lampiran 2 Rank IPM 2010-2023	72
Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif	73
Lampiran 4 Common Effect Model.....	74
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	76
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman.....	76
Lampiran 7 Hasil Model Terbaik Random Effect (REM)	76

ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN DI 10 PROVINSI DENGAN IPM TERTINGGI DI INDONESIA

Abstrak

Ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan di Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia selama periode 2010-2023. Data yang digunakan penelitian ini mencakup tujuh variabel bebas yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penetrasi Internet, Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variabel terikatnya yaitu Rasio Gini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan berdasarkan uji statistik, model terbaik yang digunakan adalah Random Effect (REM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan Pengeluaran Pemerintah Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sementara itu, Penetrasi Internet berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa semakin luas penggunaan internet semakin kecil ketimpangan ekonomi. Disisi lain, Pengeluaran Pemerintah (Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia dan investasi pendidikan belum cukup efektif dalam menekan ketimpangan, sementara pemanfaatan internet dapat membantu pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan optimal dalam distribusi anggaran agar dampaknya lebih merata.

Kata kunci : Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Penetrasi Internet, Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pembangunan fisik maupun non fisik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus terus mendorong pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Pembangunan dipahami sebagai proses dinamis yang bertujuan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik dengan fokus pada kemajuan dan keberlanjutan. Pembangunan manusia adalah konsep yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Menurut (Widodo dkk., 2011) pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut tidak hanya diukur dari produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Keberhasilan pembangunan manusia tercermin dari sejauh mana masalah mendasar masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf dapat teratasi. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

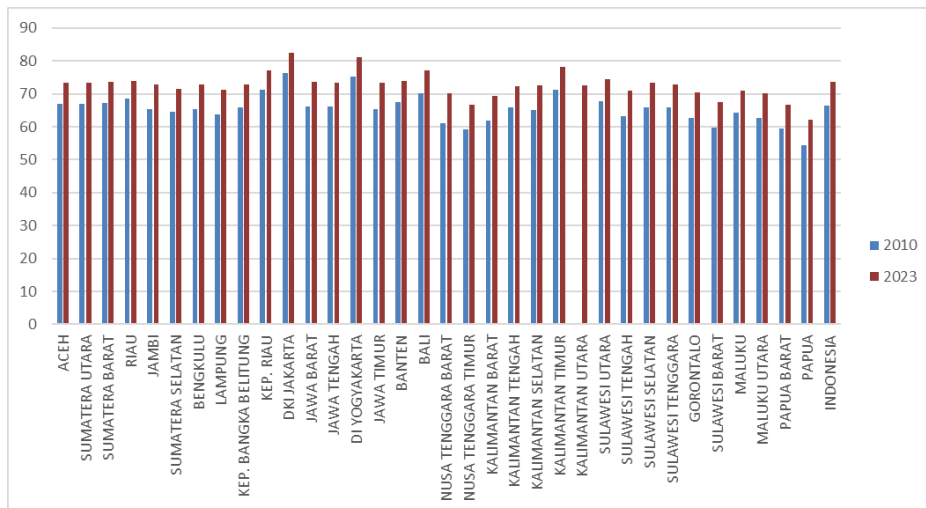
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat suatu negara atau daerah. IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), Indeks ini mengukur tiga dimensi utama, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar layak hidup. Dimensi kesehatan (diukur dari angka harapan hidup), pendidikan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf), dan standar hidup layak (diukur dari daya beli). Seiring perkembangan zaman, Badan Pusat Statistik (BPS) membuat perubahan pada beberapa indikator IPM yang sudah tidak relevan untuk digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu Angka Melek Huruf yang diubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah, yang lebih mampu mempengaruhi akses terhadap pendidikan jangka panjang. Selain itu, Produk Domestik

Bruto (PDB) per kapita, yang sebelumnya digunakan untuk mengukur taraf hidup, kini telah digantikan oleh Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik secara nasional maupun regional (BPS, 2021).

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, tantangan ketimpangan antar daerah dan antar kelompok pendapatan masih menjadi kendala dalam pembangunan. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan adalah Rasio Gini, yang menunjukkan distribusi pendapatan atau kekayaan di dalam suatu populasi. Rasio Gini ini memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 berarti distribusi sempurna (tidak ada ketimpangan), dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimal (Badan Pusat Statistik, 2023). Di Indonesia, Rasio Gini berada pada kisaran 0,38-0,41 dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan adanya kesenjangan signifikan dalam hal akses ekonomi dan kesejahteraan di berbagai daerah.

Adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia disebabkan oleh sistem pemerintahan sentralisasi, dimana kewenangan sepenuhnya berada di pemerintahan pusat (Ayu Arsita, 2019). Untuk mengurangi ketimpangan tersebut maka sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32/2004 mengartikan desentralisasi sebagai “urusan pemerintahan yang diurus bersama (concurrent) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 34 Provinsi di Indonesia



Sumber : BPS 2010-2023 (Diolah)

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia antar daerah, setiap provinsi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang cukup tinggi. Pada tabel tersebut, terdapat 10 provinsi dengan IPM tertinggi yang menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Provinsi-provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Menunjukkan bahwa meskipun provinsi ini secara umum memiliki kinerja IPM yang baik, terdapat perbedaan yang signifikan antar provinsi dalam aspek pembangunan manusia. Sebagai ibu kota dan pusat kegiatan perekonomian, DKI Jakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yakni 82,46. Peningkatan IPM di wilayah metropolitan jakarta menunjukkan peningkatan dalam layanan publik, distribusi pendapatan, dan akses publik terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (BPS, 2023). Disisi lain, DI Yogyakarta yang memiliki IPM sebesar 81.07 menunjukkan keunggulannya dibidang pendidikan dan kebudayaan.

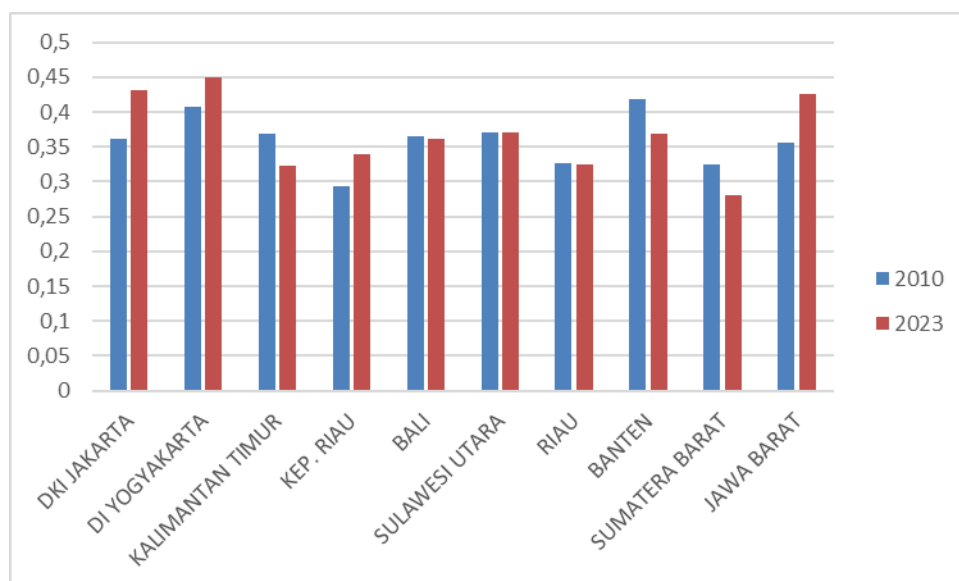
Tabel 1. 1 10 Provinsi dengan IPM Tertinggi di Indonesia

Provinsi	IPM	IPM	Rank
	2010	2023	
DKI Jakarta	76,31	82,46	1
DI Yogyakarta	75,37	81,07	2
Kalimantan Timur	71,31	78,2	3
Kep. Riau	71,13	77,11	4
Bali	70,1	77,1	5
Sulawesi Utara	67,83	74,36	6
Riau	68,65	74,04	7
Banten	67,54	73,87	8
Sumatera Barat	67,25	73,75	9
Jawa Barat	66,15	73,74	10

Sumber : BPS 2010-2023 (Diolah)

Di Indonesia meskipun IPM meningkat, disparitas antar daerah masih terlihat jelas, dengan beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur menunjukkan IPM yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan standar hidup yang memadai antara daerah maju dan tertinggal (Sofilda & Hamzah, 2015). Ketimpangan yang diukur melalui Rasio Gini seringkali tidak selaras dengan angka IPM yang tinggi di beberapa provinsi. Meskipun daerah seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki skor IPM yang tinggi, ketimpangan pendapatan dan ketidakmerataan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih terlihat (UNDP, 2021). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok dengan tingkat pendapatan rendah.

Gambar 1. 2 Data Rasio Gini 10 Provinsi dengan IPM Tertinggi



Sumber : KEMENDAGRI 2010-2023 (Diolah)

Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa meskipun 10 provinsi memiliki nilai IPM yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, data rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut masih menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ketimpangan ini tidak hanya berbeda antar daerah, tetapi juga bervariasi antar waktu, dimana rasio gini di satu provinsi bisa menunjukkan peningkatan, sementara di provinsi lain dapat mengalami penurunan. Variasi antar daerah dan antar waktu ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang berkontribusi pada variasi ketimpangan di masing-masing daerah. Tidak hanya IPM faktor lain seperti kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan juga menjadi penting dalam menganalisis pengaruhnya terhadap ketimpangan di daerah-daerah tersebut. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil sampel 10 provinsi dengan IPM tertinggi untuk melihat apakah fenomena tingginya IPM berpengaruh linier dengan rasio ketimpangan yang terdapat di 10 provinsi tersebut.

Penelitian sebelumnya (Marwan, 2023), (Zusanti et al., 2020), dan (Azim et al., 2022) mengkaji pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, memiliki hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan (Janah, 2022) menyatakan bahwa IPM memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti ingin melihat

lebih dalam mengenai pengaruh IPM terhadap ketimpangan ekonomi di daerah yang memiliki IPM tertinggi di Indonesia.

Selain melihat fenomena pengaruh IPM terhadap ketimpangan peneliti juga melihat dari faktor lain seperti indeks penetrasi internet terhadap ketimpangan di daerah. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menurut penelitian (Mohammad & Maulidiyah, 2023) berjudul Pengaruh Akses Internet Terhadap Aspek Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia, akses internet berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Semakin banyak individu yang memiliki akses dan memanfaatkan internet, semakin meningkat kualitas kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Akses internet telah menciptakan perubahan mendasar dalam cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Di Indonesia, seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan adopsi teknologi, akses internet semakin merata di seluruh negeri, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil.

Penetrasi internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun, tetapi masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat penggunaan internet antara provinsi-provinsi (APJII, 2023). Pemanfaatan internet yang semakin meluas memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet telah menjadi sarana penting yang membuka beragam peluang dan memberikan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam berbagai bidang kehidupan, internet telah menjadi alat yang memfasilitasi transformasi dan kemajuan yang pesat (Gani, 2018). Dengan adanya variabel indeks penetrasi internet peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam adakah pengaruh pada penggunaan internet terhadap ketimpangan ekonomi.

Variabel pendukung lain yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah yang mendapat alokasi anggaran lebih tinggi berperan dalam pemerataan pembangunan antar daerah. Tetapi, masih perlu dikaji seberapa besar pengaruh government spending dan penetrasi internet dalam mengurangi ketimpangan di daerah yang memiliki IPM tinggi. Berdasarkan kepada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan pengujian dan menganalisis

bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan masalah, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?
- b. Bagaimana pengaruh penetrasi internet terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?
- c. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?
- d. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?
- e. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?
- f. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?
- g. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, penetrasi internet, serta pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas yaitu :

- a. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.
- b. Untuk menganalisis pengaruh penetrasi internet terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.
- e. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.
- f. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.
- g. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap ketimpangan pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di indonesia tahun 2010-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi perspektif baru dalam bidang ekonomi dan membantu mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian ini akan mendorong pemikiran kritis dalam analisis ekonomi dan memperdalam pemahaman tentang tantangan dalam pembangunan masyarakat.

2. Masyarakat Akademis

Bagi masyarakat akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, penetrasi internet, serta pengeluaran pemerintah berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

3. Pemerintah terkait (*Stakeholder*)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasilnya akan membantu mengoptimalkan alokasi anggaran dibidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih merata di provinsi dengan IPM tinggi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu. Kesamaan variabel, tujuan, teknik analisis, dan temuan penelitian yang digunakan sebagai referensi penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan dalam memilih penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh (Yoertiara & Feriyanto, 2022), mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan analisis data panel (2012-2021) pada 6 Provinsi di Pulau Jawa. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, IPM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa. Fokus penelitian ini adalah pada peran peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata melalui kemudahan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan pendapatan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang program peningkatan IPM yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup sekaligus pengurangan ketimpangan pendapatan.

Studi yang dilakukan (Janah, 2022) menganalisis pengaruh tingkat PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode data panel berupa data cross section dari 34 provinsi di Indonesia dan data time series tahun 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari sumber resmi seperti BPS. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil studi menunjukkan PDRBKP berpengaruh negatif dan signifikan, IPM berpengaruh positif dan signifikan, PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan. Artinya meningkatnya nilai PDRBPKP akan berdampak pada meningkat pula kualitas SDM atau membaiknya IPM, serta akan berdampak pada peningkatan PMA yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Rahmawati, 2022), menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data time series dari tahun 2004-2020. Data yang digunakan bersifat sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan dukungan perangkat lunak STATA. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan, tenaga kerja memiliki hubungan positif tidak signifikan, dan pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2004-2020. Artinya pengeluaran pemerintah berpotensi meningkatkan ketimpangan, tenaga kerja belum memberikan dampak signifikan, sedangkan pembangunan manusia efektif menurunkan ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian (Azmi Azizah & Ima Amailah, 2023) terkait perkembangan variabel pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel independen yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), akses internet, dan pembiayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2016-2021. Hasil menunjukkan LPE tidak berpengaruh, akses internet berpengaruh negatif dan signifikan, dan pembiayaan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gini. Artinya semakin tinggi akses internet disuatu wilayah, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa akses internet dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mendukung pembangunan daerah yang lebih merata, dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Dyah Makutaning, 2022) kontribusi teknologi informasi dan komunikasi terhadap kelompok ketimpangan pendapatan daerah. Data yang digunakan bersifat sekunder BPS, metode yang digunakan adalah analisis data panel 33 provinsi tahun 2012-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel (CEM, FEM, REM). Hasil menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer berpengaruh positif dan signifikan,

persentase rumah tangga yang mengakses internet berpengaruh negatif dan signifikan, RLS dan PDRB perkapita tidak signifikan terhadap rasio Gini. Artinya internet menjadi variabel yang secara konsisten mengurangi ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2023) mengkaji pengeluaran pemerintah provinsi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, menunjukkan temuan yang penting. Data penelitian ini bersifat sekunder dengan metode analisis data panel 34 provinsi (2015-2019). Teknik analisis menggunakan Model Fixed Effect. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja di sektor-sektor tersebut mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan infrastruktur, sehingga mendukung pemerataan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan (Dustmann et al., 2018) berjudul *housing expenditures and income inequality*. Mengungkapkan temuan menarik terkait pengeluaran sosial, seperti belanja pemerintah untuk perumahan dan fasilitas umum, dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sosial berdampak signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di 30 negara OECD, terutama karena kelompok berpenghasilan rendah menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk biaya perumahan. Pengeluaran ini lebih berdampak saat krisis, dimana ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang lebih adil untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah, terutama saat terjadi krisis ekonomi.

(N. P. V. S. Putri & Natha, 2014) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAK), dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk analisis data panel dari kab/kota di provinsi Bali (2008-2012), yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel		Data	Metode	Hasil
	dependen	independen			
Anin Nabail Azim, et al., (2022)	Ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi	IPM, infrastruktur jalan, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing	Analisis data panel	Fixed Effect (FEM).	-IPM, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi. -Infrastruktur jalan, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi. -Penanaman modal dalam negeri, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi. -Penanaman modal asing, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi.
Queentha Monica Maorencia &	Ketimpangan distribusi pendapatan	Pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam	Analisis data panel 2018-2022	Pendekatan deskriptif asosiatif, Fixed Effect (FEM)	-Pertumbuhan ekonomi, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

Marwan (2023)		negeri, penanaman modal asing, IPM			ketimpangan distribusi pendapatan. -Penanaman modal dalam negeri, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. -Penanaman modal asing, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. -IPM, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Eko Nursahid et al., (2018)	Ketimpangan pendapatan	Investasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, tenaga kerja, IPM	Data time series 2008-2013	Analisis regresi linear berganda	-Investasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. -Tenaga kerja, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. -IPM, berpengaruh negative dan tidak

					signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Ayesha Afzal et al., (2022)	Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Penetrasi teknologi (Pengguna internet, pelanggan broadband, pelanggan telepon seluler)	Analisis data panel 86 negara 2005-2020 , sumber Global Economy Database dan World Development Indicators	Sys-GMM dua langkah	-Penetrasi teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin banyak penetrasi teknologi, tingkat kemiskinan menurun. - Penetrasi teknologi bersifat non linear. Awalnya penetrasi teknologi meningkatkan ketimpangan (positif signifikan), tetapi seiring penyebarannya yang lebih luas, penetrasi menurunkan ketimpangan (negatif signifikan)
Alfath Pranisa et al., (2023)	Ketimpangan pendapatan	Government spending (ekonomi, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan), PDRB perkapita, investasi, dan kemiskinan	Analisis data panel, 27 kab/kota di Jawa Barat 2015-2020	Regresi data panel dengan (FEM)	-Government spending & Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan -PDRB perkapita & kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan

					terhadap ketimpangan pendapatan
Afief El Ashfahany et al., (2020)	Ketimpangan	Dana perimbangan (DAU,DAK,DBH), pendidikan, ukuran pemerintah	Analisis data panel, 33 provinsi 2008-2017	Dynamic Panel Data (Two-step System GMM)	-Dana perimbangan dan Ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan -Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan
Rizqy Khairunnisa et al., (2021)	Ketimpangan dan Tingkat Kemiskinan	Pengeluaran pemerintah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur	Analisis data panel 2014-2018	Pendekatan deskriptif kuantitatif, Regresi data panel	-Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan Infrastruktur Tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota di Indonesia. -Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Indonesia. -Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berdampak signifikan

					terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota di Indonesia.
Chao Lian et al., (2024)	Ketimpangan pendapatan	Investasi pemerintah diberbagai sektor (pendidikan, kesehatan, keamanan, perumahan).	Data regional Tiongkok (2006-2017)	Regresi linier berganda	Investasi pemerintah disektor (pendidikan, kesehatan, keamanan, dan perumahan) berpengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.
Muhammad Abdul Malik Ridho & Diana Wijayanti (2022)	Ketimpangan pendapatan	DAU, DAK, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi.	Analisis data panel (2015-2020)	Regresi data panel (CEM,FEM,REM)	-DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia. -DAK dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. -Pertumbuhan ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Muhamad Sidik et al., (2020)	ketimpangan	DAU, DAK, DBH.	data time series Provinsi Jambi (2010-2019)	Analisis deskriptif kuantitatif dan Regresi linier berganda	-DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar provinsi jambi -DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar provinsi jambi

					-DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar provinsi jambi
A. Kardita, ND Setiawina, I. Budiasa (2018)	Ketimpangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Trade open (share ekspor-impor terhadap PDRB), dan DAU.	Data time series, Provinsi Bali (1996-2015)	Regresi berganda	-DAU, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. -Trade open tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Menurut Smith dan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan jumlah pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, yang mengakibatkan distribusi pendapatan nasional yang tidak merata di antara anggota masyarakat. Ketimpangan ini dapat dilihat dari adanya jurang antara kelompok yang memiliki pendapatan tinggi dan rendah. Sementara itu, Baldwin (1986) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Kuncoro (2006) menambahkan bahwa ketimpangan pendapatan berkaitan dengan standar hidup relatif di seluruh masyarakat, dimana kesenjangan antar daerah disebabkan oleh adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia, seperti pendidikan, keterampilan, teknologi, dan akses terhadap fasilitas dasar lainnya. Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan menggunakan rasio gini dan kurva lorenz.

2.2.1.1 Rasio Gini

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan yang besar antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketimpangan pendapatan diartikan sebagai ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Todaro & Smith (2008) ketimpangan antar daerah tergantung pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan tersebut.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilainya berkisar 0 hingga 1, dimana koefisien gini mendekati angka 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna (tidak terdapat ketimpangan pendapatan) dan nilai koefisien mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan timpang sempurna (terjadi ketimpangan pendapatan). Rasio

gini sering digunakan dalam ketimpangan karena memberikan pemahaman kuantitatif yang jelas mengenai tingkat ketimpangan pendapatan.

Tabel 2. 2 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

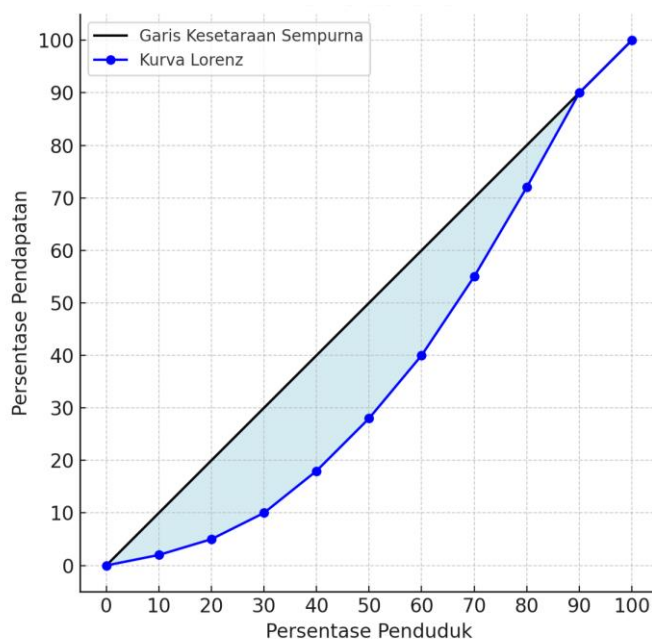
Sumber: website DPR RI

Gini Ratio dapat dihitung menggunakan Kurva Lorenz, dengan cara menentukan perbandingan antara luas area yang terletak diantara Kurva Lorenz dan garis diagonal dengan luas setengah segi empat dimana Kurva Lorenz berada.

2.2.1.2 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu daerah. Max Lorenz (1905) kurva ini menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif penduduk (sumbu horizontal) dan persentase kumulatif pendapatan (sumbu vertikal. Garis diagonal ditengah pada Kurva Lorenz disebut “garis pemerataan” karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang menerima persentase pendapatan yang sama.

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz



Semakin dekat garis Kurva Lorenz ke diagonal (semakin lurus) maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh Kurva Lorenz dari diagonal (semakin lengkung) maka distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

Beberapa faktor penyebab ketimpangan telah disebutkan dalam berbagai studi (Jannah, 2022; Wulandari & Rahmawati, 2022; Afzal, 2022; Wahyudi, 2023; Dustmann, 2018; Sidik, 2011). Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Perubahan Teknologi

Transformasi digital dan otomatisasi telah menciptakan ketimpangan antara pekerja berketerampilan tinggi dan rendah. Kemajuan teknologi seringkali menggantikan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh pekerja dengan keterampilan rendah, sehingga cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan. Hal ini didukung dengan adanya beberapa fenomena kemajuan teknologi di kalangan masyarakat yang semakin meningkat dan kurang meratanya fasilitas internet menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan di masyarakat. Dalam penelitian, peneliti menggunakan penetrasi internet sebagai salah satu variabel untuk melihat bagaimana penetrasi internet berpengaruh terhadap ketimpangan.

b. Globalisasi

Perdagangan internasional dan praktik outsourcing sering kali menguntungkan negara atau perusahaan maju, sementara disisi lain dapat merugikan pekerja berkemampuan rendah, terutama di negara berkembang. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendapatan baik di tingkat domestik maupun global yang semakin memburuk. Salah satu pengaruh globalisasi terhadap ketimpangan yaitu kemajuan teknologi dimana kemajuan teknologi dan akses internet dapat memperburuk ketimpangan di antara masyarakat.

c. Ketidaksetaraan Pendidikan dan Keterampilan

Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan kesenjangan keterampilan di kalangan pekerja. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang terdidik. Dalam konteks ini peneliti menggunakan variabel seperti anggaran pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, dan perumahan & fasilitas umum dimana faktor anggaran pemerintah di beberapa sektor ini diyakini berpengaruh dalam mengatasi ketimpangan.

d. Kebijakan Ekonomi dan Sosial

Kebijakan fiskal serta sistem redistribusi pendapatan yang tidak efektif dapat memperburuk ketimpangan. Contohnya, pengurangan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi atau alokasi belanja publik yang tidak merata dapat memperparah kesenjangan ekonomi. salah satu variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diyakini dan dinilai dapat berpengaruh baik terhadap pengentasan ketimpangan. Namun, sebaliknya jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan antar kelompok maupun daerah.

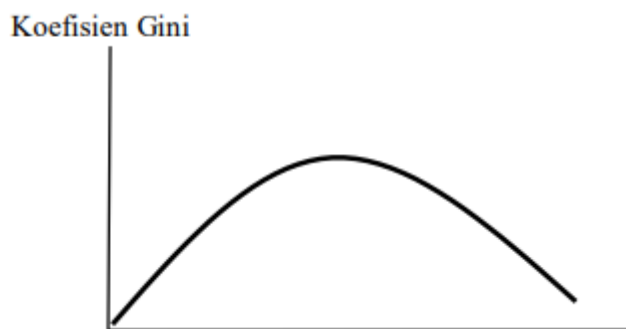
2.2.2 Simon Kuznets

Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung tidak merata. Namun, setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan mulai membaik dan menjadi lebih merata, yang bisa diukur dengan indeks pembangunan manusia tertentu. (Putri & Aminda, 2024) . Dalam teori ini Simon Kuznets membagi negara menjadi 3 bagian dalam tahap perkembangan,

yaitu negara berpenghasilan rendah (*Low-income*) dimana dominasi sektor agraris yang memiliki ketimpangan rendah namun kesejahteraan rendah, kedua, negara berpenghasilan menengah (*middle – income*) dimana terjadi transisi industri yang meningkatkan kesenjangan karena mulai adanya urbanisasi., ketiga negara berpenghasilan tinggi (*high – income*) dimana ketimpangan berkurang karena redistribusi kekayaan melalui kebijakan sosial. Di Indonesia saat ini dikategorikan sebagai upper middle-income country, yang berarti masih berada dalam transisi dari negara berpenghasilan menengah ke tahap lebih maju.

Dalam konteks penelitian ini pemilihan provinsi dengan indeks pembangunan manusia tinggi cenderung pada fase menurunnya kurva kuznets, dimana ketimpangan mulai berkurang seiring dengan mudahnya akses seperti teknologi, pendidikan, dan layanan publik. Dalam suatu wilayah yang proses pembangunan ekonominya yang cukup pesat dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tinggi menemukan adanya suatu hubungan positif antara lajunya pertumbuhan dan tingkat senjangnya ekonomi Tulus T.H Tambunan (2001, dalam Rahman & Imansyah,2021).

Gambar 2. 2 Kurva Kuznets



Dengan demikian, pemilihan 10 provinsi dengan IPM tertinggi dapat dikaitkan dengan tahap perkembangan ekonomi yang lebih maju dibanding provinsi lain. Perbedaan sektor ekonomi di tiap provinsi dapat menunjukkan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kurva Kuznets diantara provinsi yang menjadi sampel pada penelitian ini yang memeberikan perspektif tambahan sebagai teori yang mengkaitkan antara IPM dengan rasio gini di 10 provinsi di Indonesia.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 1990, program Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Development Program (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu ukuran standar pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup. IPM mengukur sejauh mana suatu penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Menurut UNDP (1995:103), pembangunan manusia bertumpu pada empat pilar utama: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. *produktifitas* mendorong penduduk untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan ekonomi guna menciptakan kesejahteraan bersama. *Pemerataan* bertujuan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bagi semua individu. *Kesinambungan* memastikan sumber daya dikelola secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sementara itu, *Pemberdayaan* menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, sehingga mereka dapat menentukan arah kehidupan sesuai harapan.

Tabel 2. 3 Pengukuran IPM

Dimensi	Pengukuran	Nilai	
		Maksimum	Minimum
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	85 tahun	25 tahun
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	18 tahun	0
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	15 tahun	0
Pendapatan	Pengeluaran Per Kapita (PPP)	berdasarkan PPP global	berdasarkan PPP global

Sumber : UNDP 1990

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari pengukuran tersebut, IPM digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang, serta untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan nilai IPM, status pembangunan manusia diukur dalam empat tingkat: Rendah ($IPM < 60$), Menengah Bawah ($60 < IPM < 70$), Menengah Atas ($70 < IPM < 80$), dan Tinggi ($IPM > 80$) (BPS, 2014).

2.2.4 Penetrasi Internet

Penggunaan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan aksesnya. Penetrasi internet menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana masyarakat dapat terhubung dengan dunia digital dan memanfaatkan teknologi untuk berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan layanan publik. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, tingkat penetrasi internet mencapai 64,8% dari total populasi. Angka ini terus meningkat 73,7% pada 2020, 77,1% pada 2022, dan 78,19% pada 2023. Namun, terdapat kesenjangan digital antara wilayah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan). Persentase penggunaan internet di daerah perkotaan mencapai 69,5%, sementara di pedesaan hanya sebesar 30,5%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan penggunaan internet yang dipengaruhi oleh perbedaan infrastruktur, literasi digital, serta ketersediaan layanan. Disisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang belum terhubung dengan internet, diperkirakan sekitar 63,51 juta orang di Indonesia belum bisa mengakses internet pada awal 2023 (Katadata, 2023).

Fenomena ini sejalan dengan teori kesenjangan digital (Digital Divide Theory) yang mengemukakan bahwa akses terhadap teknologi informasi sering kali tidak merata, sehingga menciptakan ketimpangan dalam memperoleh manfaat dari perkembangan digital. Kelompok masyarakat dengan akses terbatas cenderung tertinggal dalam memanfaatkan peluang ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik yang kini banyak bergantung pada platform digital (Norris, 2001). Selain itu, teori Difusi Inovasi oleh Rogers (2003) menjelaskan bahwa adopsi teknologi umumnya dimulai dari kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya lebih tinggi, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, tanpa kebijakan yang mendukung pemerataan akses dan peningkatan literasi digital, penetrasi internet dapat memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.

Tabel 2. 4 Karakteristik Pengguna Internet di Indonesia 2023

Kategori	Data
Jenis Kelamin	Laki-laki: 50,7%
	Perempuan: 49,1%

Kelompok Usia	Generasi Z (1997-2012): 34,40%
	Generasi Milenial (1981-1996): 30,62%
	Generasi X (1965-1980): 18,98%
Wilayah Pengguna	Perkotaan (Urban): 69,5%
	Pedesaan (Rural): 30,5%
Waktu Penggunaan	Rata-rata 7 jam 42 menit per hari
	Media sosial: 3 jam 26 menit per hari

Sumber: Katadata 2023

2.2.5 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur perekonomian suatu negara. Pengeluaran ini mencakup alokasi dana yang terfokus pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Tujuan utama pengeluaran ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mangkoesebroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan melalui persamaan keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$, dimana G mewakili pengeluaran pemerintah. Menurut teori keynesian, campur tangan pemerintah melalui pengeluaran memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional. Ketika pengeluaran meningkat, total permintaan agregat juga meningkat, yang pada akhirnya mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan pengeluaran dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

2.2.5.1 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sektor yang menjadi fokus utama dalam pengeluaran pemerintah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha yang direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi diri mereka. Ini mencakup aspek kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup di masyarakat. Pengalokasian sejumlah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan menunjukkan

komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan serta menjamin akses yang merata di berbagai daerah di Indonesia (Wahid, 2012).

Pengeluaran disektor pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas tenaga kerja serta ketimpangan pendapatan. Berdasarkan ILO (2015), pekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah, perkembangan karir yang lambat, dan akses kerja yang terbatas dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan dalam menciptakan kesetaraan peluang ekonomi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sadono Sukirno (2000), menyatakan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan tenaga kerja terampil yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, pendidikan dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan kontribusi positif dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.5.2 Kesehatan

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan adalah bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat atas pelayanan kesehatan.

Pengeluaran di bidang ini berkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada dimensi kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup. Menurut Todaro & Smith (2003), layanan kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan akses yang merata terhadap layanan kesehatan, kesenjangan ekonomi antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, dapat diminimalisasi.

2.2.5.3 Perumahan & Fasilitas Umum

Pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum merupakan upaya untuk memastikan akses yang setara terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti perumahan yang layak, air bersih, sanitasi, serta tenaga listrik dan telekomunikasi. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan pemukiman, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perumahan yang layak bagi rakyat Indonesia, dengan penekanan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tujuan pengeluaran di bidang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menyediakan fasilitas dasar, serta memastikan kualitas hidup yang layak bagi seluruh masyarakat.

Menurut Bappenas (2003), pengeluaran dalam bidang perumahan dan fasilitas umum secara langsung berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang kurang berkembang. Penyediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan irigasi dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Daerah yang memiliki infrastruktur lebih baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, pengeluaran ini bisa membantu meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya tertinggal. Selain itu, investasi di bidang ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat di daerah terpencil terhadap layanan sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

2.2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan mendukung pemerataan keuangan antar daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU bertujuan membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai dalam menjalankan pembangunan. Dana ini digunakan untuk berbagai program pembiayaan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang secara

langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

(Aryanto, 2011) menyatakan bahwa DAU berperan dalam mengurangi ketimpangan antar daerah dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada daerah yang memiliki pendapatan rendah. Jika dikelola dengan baik, DAU dapat mendukung pembangunan yang produktif, memperluas akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

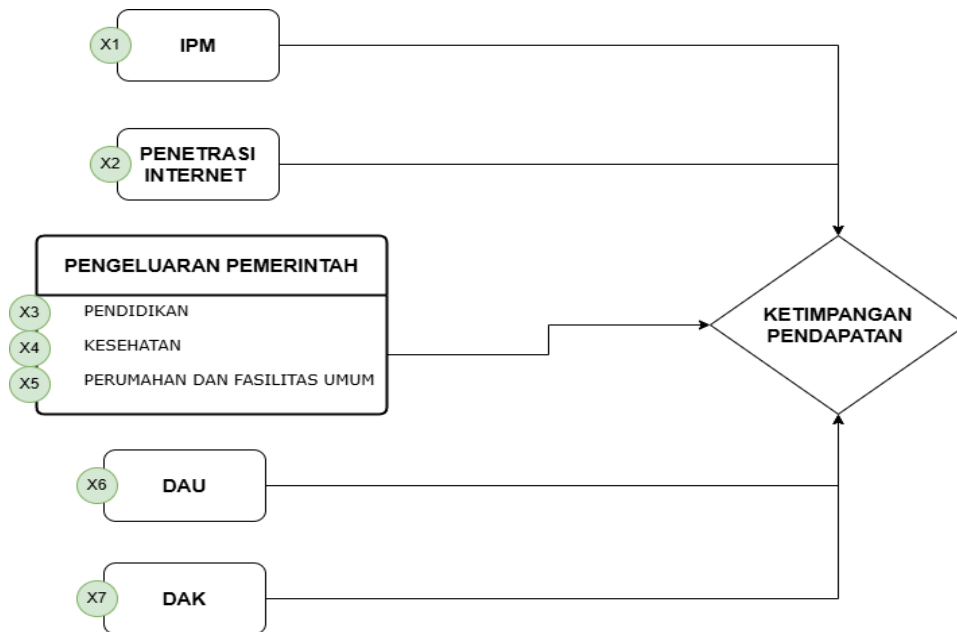
2.2.7 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. DAK umumnya diprioritaskan untuk bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurut Azizi (2018), DAK terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik bertujuan untuk mendanai proyek infrastruktur, contohnya pembangunan jalan, jembatan atau irigasi yang tujuannya agar masyarakat memiliki akses lebih baik kelayanan publik. Disisi lain, DAK non fisik, seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan(DBOK), lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan atau pendidikan yang berdampak langsung pada taraf hidup masyarakat. Fatihudin dan Mauliddah (2019) menyatakan bahwa DAK mampu mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori, kerangka pemikiran disusun sebagai peta konsep yang menggambarkan alur dan hubungan antar variabel dalam penelitian.

Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi serta temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- IPM berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
- Penetrasi internet berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
- Pengeluaran pemerintah pendidikan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
- Pengeluaran pemerintah kesehatan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
- Pengeluaran pemerintah perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
- DAU berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
- DAK berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data time series mencakup runtun waktu 2010-2023, sementara data cross section terdiri atas 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, APJII, serta laporan pemerintah daerah merupakan beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data.

3.2 Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan terikat (dependen). Variabel bebas (X) adalah variabel yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Sementara variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas.

3.3 Variabel Terikat (Dependensi)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini. Ketimpangan pendapatan menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan di suatu daerah berlangsung secara merata atau tidak. Pemilihan variabel ini sebagai fokus utama karena membantu dalam memahami disparitas tingkat kesejahteraan dan keadilan ekonomi di masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, layanan kesehatan, akses terhadap teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di daerah yang diteliti.

3.4 Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, Variabel independen dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang paling kompleks untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Indeks ini dipilih karena dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat, serta berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan mencakup nilai IPM dari sepuluh provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia selama periode 2010 hingga 2023. Analisis ini juga melibatkan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi serta faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan di setiap daerah tersebut.

B. Variabel Penetrasi Internet (P.NET)

Penetrasi internet mencerminkan persentase populasi yang memiliki akses terhadap layanan internet di suatu daerah. Data ini diperoleh dari laporan tahunan BPS dan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII). Internet memperluas akses informasi, meningkatkan pendidikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

C. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan (PEND)

Anggaran pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di alokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Data anggaran pendidikan diperoleh dari laporan resmi APBD setiap provinsi tahun 2010 hingga 2023, berdasarkan satuan ribu rupiah.

D. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan (KES)

Pengeluaran kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur kesehatan, pengadaan alat medis, serta pelaksanaan program kesehatan lainnya. Data yang digunakan mencakup periode 2010 hingga 2023, dinyatakan dalam satuan ribu rupiah.

E. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU)

Anggaran yang dipilih oleh pemerintah untuk pengembangan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana ini difokuskan pada pembangunan perumahan yang layak, penyediaan fasilitas umum yang memadai, serta penguatan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Data yang terkumpul meliputi rentang waktu tahun 2010 hingga 2023, dengan nilai satuan ribu rupiah.

F. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah dan mengatasi ketimpangan fiskal. Dana ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran daerah, termasuk dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, operasional pemerintahan, dan belanja pegawai. Data yang diamati mencakup periode tahun 2010 hingga 2023, dengan satuan nilai dalam rupiah, yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

G. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dari APBN untuk mendukung pembangunan daerah sesuai prioritas nasional, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Data DAK mencakup periode 2010 hingga 2023, dinyatakan dalam satuan ribu rupiah, dan bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.5 Metode Analisis

Metode analisis penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Analisis data dilakukan menggunakan Eviews 10 untuk mengestimasi model regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (variabel yang tidak terpengaruh) terhadap variabel dependen (variabel yang terpengaruh), yang diukur dengan Rasio Gini.

3.6 Pendekatan Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode estimasi model regresi data panel yang dianalisis melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (ECM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Widarjono, 2018).

3.6.1 Model Common Effect (CEM)

Pendekatan model common effect merupakan suatu model regresi yang menggabungkan data cross section dan time series melalui metode Ordinary Least Squares (OLS) untuk estimasi data panel. Model ini merupakan yang paling sederhana dibandingkan dengan model lainnya, karena mengasumsikan bahwa intersep dan slope (kemiringan) tetap konstan, baik antar waktu maupun individu. Berikut hasil persamaan model common effect:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{1it} + \beta_2 NET_{2it} + \beta_3 PEND_{3it} + \beta_4 KES_{4it} + \beta_5 PFU_{5it} + \beta_6 DAU_{6it} + \beta_7 DAK_{7it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan

γ_{it}	: Ketimpangan Pendapatan
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$	: Koefisien <i>IPM</i> , <i>NET</i> , <i>PEND</i> , <i>KES</i> , <i>PFU</i> , <i>DAU</i> , <i>DAK</i>
IPM_{1it}	: indeks pembangunan manusia
NET_{2it}	: penetrasi internet (%)
$PEND_{3it}$	: pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (Rp)
KES_{4it}	: pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (Rp)
PFU_{5it}	: pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum (Rp)
DAU_{6it}	: dana alokasi umum (Rp)
DAK_{7it}	: dana alokasi khusus (Rp)
ϵ_{it}	: Variabel gangguan (error)

3.6.2 Model Fixed Effect (FEM)

Pendekatan pada model fixed effect digunakan untuk mengatasi perbedaan antar individu yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Model ini mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki intersep yang berbeda, sementara kemiringannya tetap sama. Untuk mengontrol perbedaan ini, digunakan variabel dummy yang mencerminkan karakteristik unik masing-masing individu dalam analisis. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\gamma_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln IPM_{1it} + \beta_2 \ln NET_{2it} + \beta_3 \ln PEND_{3it} + \beta_4 \ln KES_{4it} + \beta_5 \ln PFU_{5it} + \beta_6 \ln DAU_{6it} + \beta_7 \ln DAK_{7it} + \beta_8 d_2 + e_{it}$$

Keterangan : D = Dummy

3.6.3 Model Random Effect (REM)

Model random effect mirip dengan fixed effect, namun perbedaannya terletak pada pendekatan dalam penanganan perbedaan intersep. Pada fixed effect, perbedaan intersep antar individu diakomodasi secara langsung dengan menggunakan variabel dummy, sedangkan dalam random effect, perbedaan intersep dipandang sebagai bagian dari residual yang bersifat acak. Dengan kata lain, random effect memperlakukan perbedaan antar individu sebagai variabel acak yang tidak dapat dijelaskan oleh model, dan perbedaan ini diestimasi menggunakan metode Generalized Least Square (GLS).

3.7 Pemilihan Model

Pemilihan model regresi untuk data panel dilakukan dalam dua tahap. Pertama, membandingkan model common effect dengan fixed effect. Tahap kedua, membandingkan model fixed effect dengan random effect. Proses ini menggunakan uji statistik yaitu Uji Chow (untuk common effect dan fixed effect) dan Uji Hausman (untuk fixed effect dan random effect).

3.7.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* atau *common effect model*. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji F, untuk menguji perbedaan kedua model tersebut. Jika nilai signifikan dari uji $F \leq 0,05$, maka model *fixed effect* dianggap lebih baik. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka model *common effect* dianggap lebih sesuai.

H0: Common effect model (nilai prob. $F > \alpha = 5\%$)

H1: Fixed effect model (nilai prob. $F < \alpha = 5\%$)

Jika hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model terbaik adalah common effect model, maka analisis regresi data panel dapat langsung dilanjutkan. Namun, jika fixed effect model teridentifikasi sebagai model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk membandingkan *fixed effect model* dengan *random effect model*.

3.7.2 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan setelah Uji chow untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Pengujian ini membandingkan kedua model berdasarkan probabilitas, jika hasil pengujian menolak H_0 maka model *fixed effect* dipilih. Sebaliknya, jika H_0 diterima, maka model *random effect* digunakan.

H_0 : Random effect model. Nilai prob, Chi-Square > dari $\alpha = 5\%$

H_1 : Fixed effect model. Nilai prob, Chi-Square < dari $\alpha = 5\%$

Jika hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect model*, maka analisis regresi data panel dapat langsung dilakukan. Namun, jika *random effect model* yang dipilih sebagai model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan *uji lagrange multiplier* untuk membandingkan antara *common effect model* dan *random effect model* (Widarjono, 2018).

3.8 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara *common effect model* (CEM) dan *random effect model* (REM) (Widarjono, 2018). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Nilai Chi-Square > dari $\alpha = 5\%$ (Common Effect Model).

H_1 = Nilai Chi-Square < dari $\alpha = 5\%$ (Random Effect Model).

Jika nilai Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau lebih besar dari 0,05 maka model terbaik yang dipilih adalah common effect model. Sebaliknya jika nilai Chi-Square lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau lebih kecil dari 0,05 maka model terbaik yang dipilih adalah random effect model (Widarjono, 2018).

3.9 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah variabel-variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2):

3.9.1 Uji Parsial t

Digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

Uji dilakukan dengan nilai t-hitung maupun nilai probabilitas sebagai berikut:

- a. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau nilai prob $> \alpha = 5\%$ maka menerima H_0 yang artinya secara individu tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai prob $< \alpha = 5\%$ maka menolak H_0 yang artinya secara individu ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji Simultan f

Digunakan untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan, yaitu apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji F $< 0,05$ maka model regresi layak digunakan untuk menjelaskan variabel dependen (Sugiyono, 2013).

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Jika dilakukan dengan nilai F-tabel atau nilai probabilitas sebagai berikut :

- a. Jika nilai $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ atau prob $> \alpha = 5\%$ maka menerima H_0 yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai f -hitung $>$ dari f -tabel atau $\text{prob} < \alpha = 5\%$ maka menolak H_0 yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.9.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase variasi ketimpangan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan moderasi dalam model. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan model yang baik dalam menjelaskan variasi ketimpangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Analisis dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia akan dijabarkan dalam bab ini. Pada penelitian ini, data cross section mencakup 10 Provinsi dengan rentang waktu 2010 hingga 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berjumlah delapan variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Pendapatan, yang diukur menggunakan Rasio Gini. Variabel independent terdiri IPM, Penetrasi Internet (PNET), Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND), Kesehatan (KES), Perumahan dan Fasilitas umum (PFU), serta DAU dan DAK. Berikut disajikan deskripsi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Gini	IPM	PNET (%)	PEND (triliun)	KES (triliun)	PFU (triliun)	DAU (triliun)	DAK (triliun)
<i>Mean</i>	0.374479	73.51843	62.59771	3.360221	1.236254	1.364843	1.138148	1.204615
<i>Maximum</i>	0.459000	82.46000	98.08000	22.95285	11.39459	15.43675	9.271388	11.41794
<i>Minimum</i>	0.280000	66.15000	14.60000	0.003080	0.004233	0.001694	0.001504	0.001129
<i>Std. Dev.</i>	0.041058	3.697807	23.21451	4.864367	2.219446	2.315608	0.993757	2.108979
<i>Observations</i>	140	140	140	140	140	140	131	132
<i>Cross Section</i>	10	10	10	10	10	10	10	10

Sumber : lampiran 3

Dalam sajian tabel analisis statistic deskriptif dapat diketahui nilai *Maximum* rasio gini sebesar 0,459000 yang diperoleh dari Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2022, sedangkan nilai *Minimum* rasio gini sebesar 0,280000 yang diperoleh dari Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Nilai rata-rata rasio gini selama tahun 2010-2023 sebesar 0,374479, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,041058. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendapatan yang bervariasi antar provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwasanya nilai *Maximum* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,46000 yang diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 66,15000 yang diperoleh dari Provinsi Jawa

Barat pada tahun 2010. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 73,51843, dengan nilai standar deviasi sebesar 3,697807. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 10 provinsi tersebut memiliki IPM yang tinggi secara rata-rata, terdapat variasi dalam tingkat pembangunan manusia di setiap provinsi, yang dapat mencerminkan perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwasanya nilai *Maximum* Penetrasi Internet (PNET) sebesar 98,08000 yang diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 14,60000 yang diperoleh dari Provinsi Banten pada tahun 2010. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 62,59771, dengan nilai standar deviasi sebesar 23,21451. Hal ini menunjukkan adanya disparitas penetrasi internet antar provinsi, yang memengaruhi akses informasi dan peluang ekonomi.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwasanya nilai *Maximum* Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND) sebesar 22,95285 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 0,003080 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Bali pada tahun 2016. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 3,360221(triliun), dengan nilai standar deviasi sebesar 4.864367 (triliun). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam Pengeluaran Pemerintah Pendidikan antar provinsi, yang berpengaruh pada kualitas pendidikan. Nilai *Maximum* Pengeluaran Pemerintah Kesehatan (KES) sebesar 11,39459 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 0,004233 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Bali pada tahun 2016. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 1,236254 (triliun), dengan nilai standar deviasi sebesar 2,219446 (triliun). Nilai *Maximum* Pengeluaran Pemerintah Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU) sebesar 15,43675 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 0,001694 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Bali pada tahun 2016. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 1,364843 (triliun), dengan nilai standar deviasi sebesar 2,315608 (triliun).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwasanya nilai *Maximum* Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 9,271388 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 0,001504 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Riau pada tahun 2021. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 1,138148 (triliun), dengan nilai standar deviasi sebesar 0,993757 (triliun). Hal ini

menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi DAU antarprovinsi, yang memengaruhi pembangunan daerah. Nilai *Maximum* Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 11,41794 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, sedangkan nilai *Minimum* nya sebesar 0,001129 (triliun) yang diperoleh dari Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017. Nilai rata-rata selama tahun 2010-2023 sebesar 1,204615 (triliun), dengan nilai standar deviasi sebesar 2,108979 (triliun). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi DAK antarprovinsi, yang memengaruhi pemerataan pembangunan.

4.2 Hasil Analisis Regresi

4.2.1 Pengujian Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Langkah pertama dalam uji regresi data panel adalah mencari tahu model terbaik dalam pengolahan data, metode terbaik dipilih dari perhitungan menggunakan uji *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pertama metode Common Effect merupakan model yang hanya menggabungkan data time series dan cross section tanpa mempertimbangkan perbedaan antar waktu maupun antar individu. Kedua, metode Fixed Effect merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa intercept bervariasi antar individu. Ketiga, metode Random Effect yaitu model yang mempertimbangkan variabel gangguan memiliki hubungan antar individu dan antar waktu (Widarjono, 2018). Metode ketiga ini dilakukan secara bertahap, mulai dari *common effect*, lalu *fixed effect*, dan terakhir *random effect*. Metode yang memberikan hasil terbaik akan dipilih untuk analisis lebih lanjut. Adapun hasil estimasi model sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Pengujian CEM, FEM, dan REM.

Variabel	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	<i>Coefficient</i>	<i>Prob.</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob.</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob.</i>
<i>C</i>	-0.293425	0.0034	-0.291075	0.3512	-0.212601	0.3522
<i>IPM</i>	0.010358	0.0000	0.010120	0.0340	0.009004	0.0144
<i>PNET</i>	-0.001612	0.0000	-0.001343	0.0254	-0.001242	0.0123
<i>PEND</i>	0.008270	0.0005	0.001967	0.0205	0.002531	0.0086
<i>KES</i>	-0.012545	0.0236	0.004314	0.5117	-0.001694	0.4067
<i>PFU</i>	-0.002868	0.5069	0.002894	0.3662	0.000284	0.9107
<i>DAU</i>	0.000881	0.8319	-0.001812	0.1781	-0.001485	0.2299
<i>DAK</i>	-0.000867	0.7402	-0.000936	0.3979	-0.000621	0.6191
<i>R-squared</i>	0.371959		0.754718		0.211876	
<i>F-Statistic</i>	10.068.29		21.15392		4.570212	
<i>Prob. F-Statistic</i>	0.00000		0.000000		0.000150	
<i>Observations</i>	127		127		127	

Sumber : Lampiran 4

Setelah dilakukan pengujian terhadap data menggunakan tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk mendapatkan model terbaik dalam penelitian ini.

4.3 Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan metode analisis pada data panel bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk analisis. Tiga pengujian utama yang digunakan, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Masing-masing berfungsi untuk membandingkan berbagai model: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* (Widarjono, 2018). Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan model yang paling tepat.

4.3.1 Uji Chow

Langkah pertama untuk menentukan model terbaik adalah dengan menggunakan uji Chow, yang bertujuan memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) (Widarjono, 2018). Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas (P) untuk *Cross-section F*. Jika nilai $p > \alpha$ 5% maka model terpilih

adalah CEM dan sebaliknya jika nilai $p < \alpha = 5\%$ maka model terpilih adalah FEM. Hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model (nilai prob. } F > \alpha = 5\%)$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model (nilai prob. } F < \alpha = 5\%)$$

Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	19.072561	(9,110)	0.0000
Cross-section Chi-square	119.404843	9	0.0000

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.3 uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Cross-section Chi Square* sebesar 0,0000 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM), selanjutnya dilakukan Uji Hausman.

4.3.2 Uji Hausman

Langkah kedua untuk menemukan model terbaik peneliti menguji data penelitian dengan menggunakan Uji Hausman, yang digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas (P) untuk *Cross-section F*. Jika nilai $p > \alpha = 5\%$ maka model terpilih adalah REM dan sebaliknya jika nilai $p < \alpha = 5\%$ maka model terpilih adalah FEM. Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model (nilai prob. } F > \alpha = 5\%)$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model (nilai prob. } F < \alpha = 5\%)$$

Tabel 4. 4 Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section random	0.000000	7	1.0000

Sumber : lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.4 Uji Hausman, nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 1,0000 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ($1,0000 > 0,05$), yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik adalah *REM*. Pengujian Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan karena *Common Effect Model* telah dieliminasi ketika Uji Chow.

4.4 Model Terbaik

4.4.1 Model Random Effect

Pengolahan regresi data panel dilakukan melalui dua tahap, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Dari hasil analisis, model yang paling sesuai adalah *Random Effect Model* (REM). Model ini mengasumsikan bahwa variabel gangguan (error terms) memiliki hubungan antar individu dan antar waktu. REM memandang variabel gangguan sebagai kombinasi dari dua komponen, yaitu variabel gangguan keseluruhan (gabungan *time series* dan *cross-section*) serta variabel gangguan secara individu (Widarjono, 2018).

Tabel 4. 5 Model Terbaik Random Effect Model

<i>Variabel</i>	<i>Coeffecient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>Keterangan</i>
<i>C</i>	-0.212601	0.227634	-0.933961	0.3522	-
<i>IPM</i>	0.009004	0.003625	2.484.163	0.0144	Signifikan
<i>PNET</i>	-0.001242	0.000489	-2.542.112	0.0123	Signifikan
<i>PEND</i>	0.002531	0.000947	2.671.763	0.0086	Signifikan
<i>KES</i>	-0.001694	0.002034	-0.832756	0.4067	Tidak Signifikan
<i>PFU</i>	0.000284	0.002530	0.112399	0.9107	Tidak Signifikan
<i>DAU</i>	-0.001485	0.001231	-1.206.711	0.2299	Tidak Signifikan
<i>DAK</i>	-0.000621	0.001246	-0.498461	0.6191	Tidak Signifikan
<i>R-squared</i>	0.211876	<i>Mean dependent var</i>		0.056485	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.165516	<i>S.D. dependent var</i>		0.026671	
<i>S.E. of regression</i>	0.021692	<i>Sum squared resid</i>		0.055994	
<i>F-statistic</i>	4.570212	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.304173	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000150				

Sumber: Lampiran 7

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen didalam penelitian (Widarjono, 2018).

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, model *Random Effect* menghasilkan nilai R-Squared sebesar 0,211876 yang berarti bahwa 21,18% variasi atau perubahan pada Ketimpangan Pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penetrasi Internet (PNET), Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND), Kesehatan (KES), Perumahan & Fasilitas Umum (PFU), serta Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sisanya sebesar 78,82% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Jika dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*, nilai R^2 pada *Random Effect Model* lebih kecil. Namun, pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan *Random Effect Model* sebagai model terbaik karena mampu melihat variabel pengaruh secara lebih spesifik terhadap Rasio Gini.

4.6 Pengujian Statistik

4.6.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Gujarati, 2006). Uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-Statistik pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Dilihat dari tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0,000150 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% ($0,000150 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi alpha 5% atau pada derajat keyakinan sebesar 95%.

4.6.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independent secara individu (parsial) terhadap variabel dependen (Gujarati, 2006). Uji

t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas t-hitung dari masing-masing variabel independent. Jika nilai probabilitas t-hitung lebih besar dari 5% ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas t-hitung lebih kecil dari 5% ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.4 diatas, membandingkan hubungan antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Ketika nilai prob lebih besar dari alpha 5% maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Akan tetapi, ketika nilai prob lebih kecil dari alpha 5% maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, Variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penetrasi Internet (PNET), Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND), Kesehatan (KES), Perumahan & Fasilitas Umum (PFU), serta Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Ketimpangan Pendapatan (Nilai prob > alpha 5% ($\alpha = 0,05$)).

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, Variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penetrasi Internet (PNET), Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND), Kesehatan (KES), Perumahan & Fasilitas Umum (PFU), serta Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Ketimpangan Pendapatan (Nilai prob < alpha 5% ($\alpha = 0,05$)).

4.6.2.1 Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel IPM sebesar $0,0144 < 5\%$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara individu variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Artinya ketika IPM naik 1 maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,00900 begitu juga sebaliknya, ketika IPM turun 1 maka ketimpangan pendapatan turun sebesar 0,009004.

4.6.2.2 Variabel Penetrasi Internet (PNET)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel PNET sebesar $0,0123 < 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima.. Sehingga secara individu variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya ketika penetrasi internet naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan turun sebesar 0,001242 begitu juga sebaliknya, ketika penetrasi internet turun sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,001242.

4.6.2.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel PEND sebesar $0,0086 < 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara individu variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Artinya ketika Pengeluaran pemerintah pendidikan naik sebesar Rp 1 maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,002531 begitu juga sebaliknya, ketika *Government spending* pendidikan turun sebesar Rp 1 maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,002531.

4.6.2.4 Variabel Pengeluaran Pemerintah Kesehatan (KES)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel KES sebesar $0,4067 > 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga secara individu variabel ini tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4.6.2.5 Variabel Pengeluaran Pemerintah Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel PFU sebesar $0,9107 > 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga secara individu variabel ini tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4.6.2.6 Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel DAU sebesar $0,2299 > 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga secara individu variabel ini tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4.6.2.7 Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel DAK sebesar $0,6191 > 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga secara individu variabel ini tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4.7 Interpretasi dan Pembahasan

4.7.1 Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi IPM, semakin besar ketimpangan pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis, namun sejalan dengan prediksi Simon Kuznets, yang menyatakan bahwa di negara atau daerah dengan tingkat pendapatan perkapita yang masih rendah, maka kenaikan pendapatan perkapita akan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Dalam hal ini, tingkat pendapatan perkapita dapat diukur dengan IPM. Negara atau Provinsi dengan IPM yang masih rendah cenderung mengalami peningkatan IPM yang diikuti dengan ketimpangan yang memburuk, sehingga IPM berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan. Namun, begitu negara atau provinsi tersebut mencapai tingkat IPM tertinggi, kenaikan IPM selanjutnya akan diikuti oleh penurunan ketimpangan. Pola ini membentuk hubungan berbentuk kurva U terbalik antara ketimpangan dan IPM, sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis Kuznets. Pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung tidak merata, tetapi setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan mulai membaik dan menjadi lebih merata, yang dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia tertentu. (Putri & Aminda, 2024)

Hasil ini selaras dengan Penelitian yang dilakukan (Janah, 2022) yang menyebutkan bahwa peningkatan IPM dapat memperbesar ketimpangan pendapatan karena manfaat dari pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang sudah memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Analisis menggunakan Kurva Lorenz menunjukkan deviasi yang signifikan dari garis kesetaraan sempurna, terutama di provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Meskipun

kedua provinsi ini memiliki IPM yang tinggi, tetap menghadapi tingkat ketimpangan pendapatan yang signifikan.

Peningkatan IPM pada dasarnya menggambarkan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa elemen-elemen IPM seperti pendidikan dan kesehatan belum tersedia secara merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kelompok masyarakat tertentu, terutama yang telah memiliki akses lebih baik mendapatkan manfaat lebih besar, sementara kelompok lainnya masih tertinggal. Meskipun IPM berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Langkah-langkah strategis meliputi redistribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, perluasan akses digital untuk mendukung perekonomian dipedesaan, serta pemberian subsidi kepada kelompok berpenghasilan rendah. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan IPM tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mampu menekan tingkat ketimpangan pendapatan ditengah masyarakat.

4.7.2 Variabel Penetrasi Internet (PNET)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetrasi internet (PNET) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023. Artinya, semakin tinggi tingkat penetrasi internet, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azmi Azizah & Ima Amailah (2023), yang menemukan bahwa akses internet dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mendukung pembangunan daerah yang lebih merata, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan akses internet yang lebih luas, masyarakat dari berbagai lapisan sosial memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih baik, sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan.

Studi Afzal et al. (2022) juga mendukung temuan ini, di mana mereka menemukan bahwa penetrasi internet, terutama akses broadband, dapat berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena semakin banyak individu yang dapat mengakses pendidikan daring, layanan keuangan digital, serta

peluang ekonomi berbasis teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa efektivitas internet dalam mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja dan pemerataan infrastruktur digital. Jika akses internet hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan dan tidak diimbangi dengan peningkatan literasi digital, maka manfaatnya hanya akan dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap tertinggal.

Oleh karena itu, pemerataan akses internet di setiap provinsi dapat menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur internet tersebar secara merata, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses digital. Selain itu, peningkatan literasi digital dan program pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kebijakan yang tepat, penetrasi internet dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia..

4.7.3 Variabel Government Spending Pendidikan (PEND)

Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023. Artinya semakin besar alokasi anggaran pendidikan, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang berasumsi bahwa pengeluaran pemerintah pendidikan akan mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi pendidikan justru memperburuk ketimpangan pendapatan. Penelitian Fauziah (2018 dalam Afifah, 2021) pengeluaran pemerintah pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan yang diukur dengan rasio gini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak selalu berdampak langsung pada penurunan ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi pendidikan memerlukan tahapan dan proses dalam memberikan dampak yang optimal terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan.

Selain itu, tingginya tingkat pendidikan belum tentu secara otomatis menurunkan ketimpangan pendapatan. Masih banyak lulusan berpendidikan tinggi yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga berujung pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Fenomena ini justru dapat memperparah ketimpangan ekonomi, karena kelompok yang telah memperoleh pendidikan tinggi tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang layak tetap berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sutono, 2018) yang menemukan bahwa modal belanja APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan investasi disektor pendidikan, manfaatnya mungkin lebih dirasakan oleh pendapatan tertentu, yang pada akhirnya dapat memperlebar ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas serta distribusi anggaran pendidikan, agar tujuan pemerataan pendapatan dapat tercapai dengan lebih baik.

4.7.4 Variabel Pengeluaran Pemerintah Kesehatan (KES)

Pengeluaran Pemerintah Kesehatan (KES) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023. Artinya, meskipun alokasi anggaran kesehatan meningkat, dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan belum tentu berpengaruh, dimana ketika pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan meningkat justru ketimpangan pendapatan menurun dan sebaliknya. Hal ini di asumsikan bahwa ketika pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan menysasar pada masyarakat bawah, hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, mereka bisa bekerja lebih produktif, mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah kesehatan belum memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini bisa terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah alokasi anggaran kesehatan yang kurang merata, dimana manfaat dari alokasi anggaran kesehatan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat tertentu, sehingga tidak

mampu mengurangi ketimpangan secara signifikan. Selain itu, kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok pendapatan rendah dan tinggi juga dapat menjadi penyebab utama pengeluaran sektor kesehatan tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan. Namun, dalam hasil temuan ini peneliti belum bisa memberikan referensi penelitian yang kuat terhadap temuan tersebut.

4.7.5 Variabel Pengeluaran Pemerintah Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU)

Pengeluaran Pemerintah Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah perumahan dan fasilitas umum belum memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Namun, pada penelitian ini PFU juga berpotensi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana ketika PFU naik maka akan diikuti kenaikan ketimpangan rasio gini dan sebaliknya. Dalam penelitian ini bisa terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah distribusi alokasi belanja antara daerah perkotaan dan pedesaan masih belum merata. Pemerintah lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di kota-kota besar atau daerah yang lebih berkembang. Akibatnya daerah pedesaan yang sering kali memiliki tingkat pendapatan lebih rendah tidak menerima alokasi anggaran yang setara. Kondisi ini menyebabkan dampak dari belanja pemerintah dalam sektor perumahan dan fasilitas umum tidak dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara signifikan.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah di sektor PFU dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat membantu memaksimalkan manfaat dari belanja pemerintah di sektor ini. Dengan demikian, penyesuaian strategi alokasi dan pengelolaan anggaran di sektor perumahan dan fasilitas umum sangat diperlukan untuk

mencapai tujuan pengurangan ketimpangan pendapatan secara lebih efektif di Indonesia.

4.7.6 Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023.

Pada dasarnya dana alokasi umum bertujuan untuk membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan memberikan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruhnya sangat kecil. Hal ini mungkin disebabkan oleh alokasi dana yang tidak merata antar daerah dan pengelolaan yang kurang optimal ditingkat daerah. Daerah dengan kapasitas yang lebih rendah mungkin tidak dapat memanfaatkan dana alokasi umum secara maksimal untuk program-program yang dapat mengurangi ketimpangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, fokus pembangunan lebih mengarah pada infrastruktur fisik dibandingkan sektor lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas dana alokasi umum diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik agar dana tersebut benar-benar dapat mengurangi ketimpangan.

Menurut Kementerian Keuangan (2022), mekanisme distribusi dana alokasi umum sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan daerah tertentu, seperti tingkat kemiskinan atau ketimpangan ekonomi, sehingga efektivitasnya menurun. Penelitian (Purnamasari, 2021) menyarankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah serta perlunya pengawasan yang lebih terhadap penggunaan dana alokasi umum. Untuk meningkatkan dampaknya, pemerintah perlu melakukan reformasi pada mekanisme distribusi dana alokasi umum agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah tertentu dan mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk program-program sosial yang dapat secara langsung mengurangi ketimpangan. Dengan langkah-langkah tersebut, dana alokasi umum dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menciptakan pemerataan pembangunan serta mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

4.7.7 Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2010-2023.

Secara teori, dana alokasi khusus dibuat untuk memperbaiki ketimpangan antar daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan pengaruh dana alokasi khusus terhadap ketimpangan pendapatan masih sangat kecil. Salah satu penyebabnya adalah pendistribusian dana yang kurang merata dan sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan daerah tertentu. Menurut Kementerian Keuangan (2022), distribusi dana alokasi khusus lebih terfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan irigasi, dibandingkan dengan program sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang berpotensi memberikan dampak langsung dalam mengatasi ketimpangan.

Disisi lain, kemampuan pengelolaan di tingkat daerah juga menjadi tantangan yang signifikan. Daerah dengan kapasitas administrasi yang rendah seringkali kesulitan untuk memanfaatkan dana alokasi khusus secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat. Purnamasari (2021) menyarankan agar pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi khusus diperketat serta diarahkan pada program-program prioritas yang lebih mendesak, yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas dana alokasi khusus, pemerintah perlu memastikan bahwa penyaluran dana lebih tepat sasaran, berdasarkan tingkat ketimpangan dan kebutuhan setiap daerah. Fokus yang lebih besar pada program sosial, termasuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, harus ditingkatkan agar dana alokasi khusus dapat memberikan dampak yang nyata dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia 2010-2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah apabila IPM mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur rasio gini semakin meningkat.
2. Penetrasi Internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah apabila penetrasi internet mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan (rasio gini) semakin menurun.
3. Pengeluaran Pemerintah Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah apabila pengeluaran pemerintah pendidikan mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan (rasio gini) semakin meningkat.
4. Pengeluaran Pemerintah Kesehatan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa jika pengeluaran pemerintah kesehatan meningkat atau menurun maka tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan (rasio gini).
5. Pengeluaran Pemerintah Perumahan dan Fasilitas Umum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Artinya ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah perumahan dan fasilitas umum tidak mengurangi ketimpangan (rasio gini).
6. DAU tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Artinya ketika terjadi kenaikan jumlah DAU tidak mengurangi ketimpangan (rasio gini).

7. DAK tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Artinya ketika terjadi kenaikan jumlah DAK tidak mengurangi ketimpangan (rasio gini).

5.2 Implikasi

Berikut adalah implikasi yang dihasilkan dari penelitian secara teoritis dan praktis yang dapat disajikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan pandangan dan pemahaman terkait Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan di 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Variabel seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penetrasi Internet (PNET), Pengeluaran Pemerintah Pendidikan (PEND), Pengeluaran Pemerintah Kesehatan (KES), Pengeluaran Pemerintah Perumahan & Fasilitas Umum (PFU), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu daerah dengan IPM tinggi masih memiliki ketimpangan.
2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pandangan pemerintah dalam optimalisasi alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi untuk menekan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan secara merata. Selain itu, pemerataan akses internet ke daerah tertinggal harus menjadi prioritas, karena dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan akses informasi, serta mendukung perkembangan usaha berbasis digital. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga perlu dikelola dengan lebih efektif dan transparan, agar anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat dan mampu mengurangi kesenjangan antar daerah secara signifikan.
3. Bagi sektor swasta dan investor, penelitian ini memberikan wawasan mengenai peluang investasi di bidang pembangunan manusia. Perusahaan di sektor teknologi, pendidikan, dan kesehatan dapat menyusun strategi yang menguntungkan sekaligus berdampak sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur digital, peningkatan keterampilan tenaga

kerja, dan program CSR berbasis pendidikan serta kesehatan, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

4. Bagi masyarakat, penelitian ini menekankan peran pembangunan manusia dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, dan teknologi dalam mengurangi ketimpangan (Gini). Selain itu, akses internet yang lebih luas dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

5.3 Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna, berikut ini keterbatasan dalam penelitian :

- Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan panel unbalanced. Hal ini terjadi karena keterbatasan data Provinsi sehingga menyebabkan data tidak terdistribusi normal dan merata pada semua Provinsi.
- Penggunaan sampel 10 Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia dari 2010-2023 menjadi keterbatasan peneliti, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan hubungan pembangunan manusia dengan Rasio gini.

5.4 Saran

- Kedepannya peneliti yang melakukan penelitian dengan tema yang sama sebaiknya mempertimbangkan dalam kelengkapan data dan menambahkan variabel independent yang lain, sehingga dapat memberikan hasil dan sudut pandang yang lebih luas keterkaitan IPM terhadap rasio gini.
- Penelitian berikutnya peneliti juga dapat menambahkan jumlah sampel dan dapat mengelompokkan provinsi lebih luas dengan kriteria yang ada seperti IPM tertinggi atau IPM terendah untuk melihat kecenderungan hasil dari keterkaitan IPM dan rasio gini antar daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Rachman, F. F. (2021). Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2020. *BESTARI: Buletin Statistikan Dan Aplikasi Terkini*, 1, 1–9. <https://bestari.bpskalTIM.com/index.php/bestari-bpskalTIM/article/download/4/4>
- Afzal, A., Firdousi, S. F., Waqar, A., & Awais, M. (2022). The Influence of Internet Penetration on Poverty and Income Inequality. *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221116104>
- Aghion, P., Askenazy, P., Berman, N., & Coulon, R. (2016). *Innovation and Productivity: Analyzing the Impact of Technology and Infrastructure*. Cambridge University Press.
- APJII. (2024). [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Terhitung sejak 2018%2C penetrasi internet,78%2C19%25 di 2023](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Terhitung%20sejak%202018%20penetrasi%20internet,78%2019%20di%202023).
- Ardiningrum, L. R., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2021). Pengaruh Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(2), 59–68. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i2.13402>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Azmi Azizah, & Ima Amailah. (2023). Perkembangan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(2), 403–407. <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i2.8433>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan klasifikasi daerah . Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk4IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Rasio Gini menurut Provinsi dan Daerah . Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Carla, L. M., Andani, W., & Fakhrunnisa, A. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketersediaan Infrastruktur Listrik, dan Sanitasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Kalimantan Barat. *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, 3(2), 100–119. <https://doi.org/10.57059/formasi.v3i2.57>
- Dewi & Dyah Makutaning, et al. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal*

- Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 22(2), 221–242.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2022.13>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Daftar Alokasi TKDD 2022 .
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=22073
- Dustmann, C., Fitzenberger, B., & Zimmermann, M. (2018). Housing Expenditures and Income Inequality. SSRN Electronic Journal, 18.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3301705>
- E-Jurnal EP Unud, 4(1), 41-49. <https://media.neliti.com/media/publications/44519-ID-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum-dan-belanja-modal-terhadap-ket.pdf>
- Gani, A. G. (2014). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 2(2). <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramedia Literasi. (nd). Pengertian pertumbuhan ekonomi: Ciri-ciri, faktor dan metode pengukurannya . Gramedia.com. Diakses pada 18 Februari 2025, dar
- Hamdani, I., Sri Nesta, N., Rahmawati, J., & Hidayat, F. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan, 1(3), 187–203.
<https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.902>
- Harsono, dkk. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Janah, M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pdrb Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(4), 23–43. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183>
- Katadata. (2023, Januari). Penetrasi Internet Indonesia Capai 78% pada tahun 2023, Rekor Tertinggi Baru . Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/87d49c70d8f7fd2/penetrasi-internet-indonesia-capai-78-pada-2023-rekor-tertinggi-baru>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (nd). Gini Rasio . Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Diakses pada 18 Februari 2025, dari https://sipd.go.id/dashboard_profil/0427e1573f8953d7f1cb48a7fd97f06a7d6c1c86/?m=gini_rasio
- Ketimpangan Pendapatan, A., Kabupaten, A., Gurusinga, E. B., Engka, D. S. M., Tolosang, K. D., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D.

- (2022). Elverbinta Br Gurusinga 37. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7), 37–48.
- Kurniawan, I., Murtala, M., & Juanda, R. (2021). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3858>
- Malik, A., Wakhid, A. A., & Imtihanah, A. N. (2024). Efektifitas Kebijakan Fiskal Bantuan Progam Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam Persepektif Maqashid Syariah.
- MARDIATMOKO, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Marwan, Q. M. M. &. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia. 3, 571–580.
- Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R. (2023). Pengaruh Akses Internet Terhadap Aspek Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Triwikrama:Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 01(02), 30–
- Ningsih, I. R., & Kara, M. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 4(1), 40–54.
- Nursahid, E., & Mintarti, S. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia Analysis of factors influencing income inequality in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(1). <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>
- Olivia Theophilia, & Riko Setya Wijaya. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Telekomunikasi, E-commerce, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1528–1535. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1377>
- Prasetyo, I. D. (2017). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- Purnamasari, D. (2021). Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
- Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 3(1), 87–108. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/7667>
- Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi1Umum Dan9Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1), 41–49.

- Ramadhan, iszur maulanan sabillah. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2017. Tesis, 1–80.
- Ramadhan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(01), 108–118. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i01.1020>
- Ratnasari, GT, Wibisono, S., & Hanim, A. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian di Indonesia .
- Ratnasari, L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 32–36. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4100>
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel pada Ketimpangan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 241–253. <http://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/SNMSA/article/view/860>
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54–63. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1972>
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i3.163>
- Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Panji Mahendra, B. E. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 01–11. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.878>
- Sofilda, E., Hermiyanti, P., & Hamzah, M. Z. (2015). Determinant Variable Analysis of Human Development Index in Indonesia (Case for High and Low Index at Period 2004-2013). *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 08(09), 11–28. <http://www.ssrn.com/link/OIDA-Intl-Journal-Sustainable-D>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Alfabet.
- Sukwika, T. (2018). Pembangunan Berkelanjutan dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia .
- Supaijo, Iqbal, M., & Mawaddah, H. F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan , dan Pengeluaran Pemerintah

- Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam: Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–22. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7021>
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Rahman & Imansyah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22–42.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development. Thirteenth Edition*. In Pearson (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Todaro, MP, & Smith, SC (2003). *Pengembangan ekonomi (edisi ke-8)*. Pearson Education.
- Todaro, MP, & Smith, SC (2008). *Pengembangan ekonomi (edisi ke-10)*. Pearson Education.
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan , Pendidikan , Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720–16729. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5550>
- Wahyudi, W. (2023). Pengeluaran Pemerintah Provinsi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708–715. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasinya (Edisi Revisi)*. UPP STIMY Yogyakarta.
- Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, JM (2012). *Kebijakan Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Sosial*.
- Wulandari, D. F., & Rahmawati, F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 583–590. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1216>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>
- Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati. (2020). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(3), 602–615. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1413/0>

LAMPIRAN

Lampiran 1 data variabel dependen dan independen 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia periode 2010-2023

Provinsi	ID	Tahun	GINI	IPM	PNET (%)	PEND (Rp triliun)	KES (Rp triliun)	PFU (Rp triliun)	DAU (Rp triliun)	DAK (Rp triliun)
DKI Jakarta	1	2010	0.361	76.31	19.13	7.329.023	2.058.843	4.252.636	NA	NA
DKI Jakarta	1	2011	0.402	76.98	56.85	8.355.589	2.481.683	4.439.925	0.209900	NA
DKI Jakarta	1	2012	0.437	77.53	63.62	1.016.383	2.912.304	5.156.145	0.209909	NA
DKI Jakarta	1	2013	0.404	78.08	62.07	1.108.181	4.936.989	6.208.207	0.301182	NA
DKI Jakarta	1	2014	0.436	78.39	66.61	1.093.662	4.872.303	6.126.865	0.086000	NA
DKI Jakarta	1	2015	0.421	78.99	74.32	1.269.279	5.387.089	7.143.267	NA	NA
DKI Jakarta	1	2016	0.397	79.60	76.96	4.627.627	6.732.985	1.543.675	NA	NA
DKI Jakarta	1	2017	0.409	80.06	85.70	1.326.270	7.744.407	1.001.676	3.148.972	2.207.726
DKI Jakarta	1	2018	0.390	80.47	89.04	1.615.335	8.936.162	8.835.242	NA	3.136.632
DKI Jakarta	1	2019	0.391	80.76	93.33	2.177.883	8.894.089	7.003.876	NA	3.156.304
DKI Jakarta	1	2020	0.400	80.77	93.24	2.295.285	1.037.190	1.194.199	NA	3.230.471
DKI Jakarta	1	2021	0.411	81.11	95.44	2.007.676	1.139.459	8.783.691	NA	3.380.284
DKI Jakarta	1	2022	0.412	81.65	95.39	1.551.868	1.032.591	3.178.312	NA	3.254.557
DKI Jakarta	1	2023	0.431	82.46	98.08	1.992.635	1.108.254	3.934.720	0.022180	3.127.579
DI YOGYAKARTA	2	2010	0.407	75.37	38.12	0.175554	0.061525	0.142122	0.527471	0.011384

DI YOGYAKARTA	2	2011	0.423	75.93	43.19	0.161604	0.059286	0.194580	0.620812	0.019490
DI YOGYAKARTA	2	2012	0.449	76.15	49.32	0.244023	0.094993	0.219615	0.757057	0.019053
DI YOGYAKARTA	2	2013	0.416	76.44	51.02	0.447895	0.107939	0.322380	0.828335	0.034496
DI YOGYAKARTA	2	2014	0.435	76.81	56.03	0.259574	0.127363	0.410293	0.899924	0.037132
DI YOGYAKARTA	2	2015	0.420	77.59	61.18	0.628810	0.149565	0.456517	0.920545	0.039084
DI YOGYAKARTA	2	2016	0.425	78.38	65.36	0.355999	0.201299	0.331308	0.940835	0.719034
DI YOGYAKARTA	2	2017	0.440	78.89	71.71	1.461.432	0.169423	0.655978	0.949084	0.869490
DI YOGYAKARTA	2	2018	0.422	79.53	79.10	1.542.409	0.148141	1.012.777	1.314.372	0.946184
DI YOGYAKARTA	2	2019	0.428	79.99	83.68	1.286.706	0.176183	0.864260	1.351.102	1.033.505
DI YOGYAKARTA	2	2020	0.437	79.97	85.83	2.202.107	0.227317	0.265359	1.359.607	1.127.332
DI YOGYAKARTA	2	2021	0.436	80.22	86.88	2.655.132	0.254271	0.648392	1.265.379	1.118.939
DI YOGYAKARTA	2	2022	0.459	80.64	89.03	1.990.571	0.220183	0.169235	0.611412	0.247899
DI YOGYAKARTA	2	2023	0.449	81.07	90.18	2.395.281	0.368263	0.186491	1.267.722	0.659387
KALIMANTAN TIMUR	3	2010	0.368	71.31	22.36	0.309533	0.645148	0.965315	NA	NA
KALIMANTAN TIMUR	3	2011	0.323	72.02	37.38	0.327921	0.636804	1.509.674	0.051447	0.038188
KALIMANTAN TIMUR	3	2012	0.363	72.62	42.92	0.582675	0.766243	2.407.496	0.052638	0.052891

KALIMANTAN TIMUR	3	2013	0.366	73.21	44.31	1.695.783	1.421.794	2.055.979	0.055539	0.008048
KALIMANTAN TIMUR	3	2014	0.361	73.82	48.54	0.586330	1.047.872	1.931.855	0.057313	0.001384
KALIMANTAN TIMUR	3	2015	0.315	74.17	55.03	1.179.524	1.078.295	1.647.782	0.057313	0.008651
KALIMANTAN TIMUR	3	2016	0.328	74.59	62.68	1.020.052	1.048.674	2.461.208	0.080402	1.011.083
KALIMANTAN TIMUR	3	2017	0.333	75.12	69.06	1.671.270	1.113.464	0.903578	1.133.767	0.019402
KALIMANTAN TIMUR	3	2018	0.342	75.83	78.98	1.648.675	1.062.222	1.743.488	0.767682	1.117.791
KALIMANTAN TIMUR	3	2019	0.335	76.61	84.17	2.350.865	1.273.659	1.029.923	0.815694	1.205.662
KALIMANTAN TIMUR	3	2020	0.335	76.24	86.87	2.524.033	1.330.421	1.478.651	0.943411	1.380.818
KALIMANTAN TIMUR	3	2021	0.331	76.88	89.67	2.299.316	1.265.980	0.138523	0.856333	1.406.024
KALIMANTAN TIMUR	3	2022	0.317	77.44	93.06	2.521.482	1.611.802	0.405992	0.828907	0.738570

KALIMANTAN TIMUR	3	2023	0.322	78.20	92.98	3.678.552	1.613.027	0.342345	0.857919	0.682609
KEP. RIAU	4	2010	0.293	71.13	15.33	0.169074	0.121853	0.398225	0.338972	0.004559
KEP. RIAU	4	2011	0.379	71.61	40.50	0.451163	0.154377	0.184788	0.395746	0.021903
KEP. RIAU	4	2012	0.393	72.36	47.68	0.232922	0.086215	0.182730	0.460858	0.023166
KEP. RIAU	4	2013	0.380	73.02	49.57	0.629126	0.215272	0.257679	0.500492	0.024671
KEP. RIAU	4	2014	0.437	73.40	52.57	0.767336	0.262564	0.314287	0.698009	0.041678
KEP. RIAU	4	2015	0.339	73.75	60.53	0.576534	0.207557	0.301184	0.695944	0.042537
KEP. RIAU	4	2016	0.352	73.99	65.86	0.582546	0.430579	0.420725	0.866811	0.153294
KEP. RIAU	4	2017	0.359	74.45	73.33	0.959555	0.282729	0.330433	0.552050	0.001129
KEP. RIAU	4	2018	0.339	74.84	78.41	0.982435	0.301405	0.475055	1.257.386	0.579652
KEP. RIAU	4	2019	0.337	75.48	87.96	1.043.952	0.365910	0.481850	1.190.058	0.664044
KEP. RIAU	4	2020	0.334	75.59	91.15	1.117.715	0.321833	0.542660	1.206.474	0.806088
KEP. RIAU	4	2021	0.339	75.79	93.79	1.248.555	0.362239	0.205815	1.129.091	0.843893
KEP. RIAU	4	2022	0.325	76.46	95.26	0.871122	0.411170	0.250272	1.092.930	0.431596
KEP. RIAU	4	2023	0.340	77.11	95.98	0.994494	0.499816	0.241831	1.131.182	0.597399
BALI	5	2010	0.366	70.10	14.74	0.114060	0.098091	0.092386	0.489943	0.011135
BALI	5	2011	0.387	70.87	32.73	0.502681	0.345143	0.263695	0.560674	0.021221
BALI	5	2012	0.397	71.62	38.91	0.708805	0.332022	0.248054	0.694079	0.034026
BALI	5	2013	0.440	72.09	41.96	0.769685	0.360539	0.269360	0.792366	0.043835

BALI	5	2014	0.442	72.48	45.67	0.216558	0.451477	0.348872	0.832297	0.041601
BALI	5	2015	0.399	73.27	53.64	0.976630	0.468108	0.341710	0.831597	0.044497
BALI	5	2016	0.374	73.65	60.65	0.003080	0.004233	0.001694	0.850144	0.178123
BALI	5	2017	0.379	74.30	67.10	1.836.536	0.507840	0.404120	1.156.285	0.298576
BALI	5	2018	0.364	74.77	74.15	1.850.030	0.399671	0.361684	1.268.585	1.102.440
BALI	5	2019	0.370	75.38	79.59	1.864.571	0.561047	0.369715	1.325.848	1.150.185
BALI	5	2020	0.369	75.50	85.67	2.174.887	0.548429	0.705281	1.344.031	1.292.329
BALI	5	2021	0.375	75.69	87.80	2.905.655	0.484708	0.133748	1.241.266	1.413.067
BALI	5	2022	0.362	76.44	91.21	1.988.299	0.565872	0.067050	1.201.512	0.664096
BALI	5	2023	0.362	77.10	87.15	2.456.096	0.651841	0.079231	1.243.565	0.708135
SULAWESI UTARA	6	2010	0.370	67.83	19.77	0.097058	0.065539	0.155156	0.558635	0.052879
SULAWESI UTARA	6	2011	0.358	68.31	31.20	0.108131	0.090580	0.186421	0.619711	0.029288
SULAWESI UTARA	6	2012	0.430	69.04	32.29	0.124095	0.100845	0.344572	0.790534	0.043540
SULAWESI UTARA	6	2013	0.446	69.49	35.26	0.396810	0.172942	0.307663	0.885684	0.054346
SULAWESI UTARA	6	2014	0.436	69.96	39.10	0.109214	0.185072	0.341587	0.949853	0.059675
SULAWESI UTARA	6	2015	0.366	70.39	45.32	0.529015	0.215838	0.409230	1.026.949	0.066892
SULAWESI UTARA	6	2016	0.379	71.05	52.41	0.032848	0.075696	0.101258	1.065.545	0.668226
SULAWESI UTARA	6	2017	0.394	71.66	61.78	1.317.869	0.248222	0.487153	0.990544	0.050840
SULAWESI UTARA	6	2018	0.372	72.20	67.60	1.316.852	0.268130	0.476556	1.427.545	1.013.883
SULAWESI UTARA	6	2019	0.376	72.99	74.06	1.429.562	0.529874	0.505626	1.463.436	1.113.503

SULAWESI UTARA	6	2020	0.368	72.93	78.50	1.520.299	0.788497	0.366019	1.488.990	1.178.929
SULAWESI UTARA	6	2021	0.359	73.30	81.57	1.537.034	0.481775	0.034570	1.374.485	1.072.036
SULAWESI UTARA	6	2022	0.359	73.81	83.54	1.073.563	0.548758	0.261501	1.330.464	0.762167
SULAWESI UTARA	6	2023	0.370	74.36	85.86	1.179.764	0.414145	0.129537	1.377.030	0.743782
RIAU	7	2010	0.326	68.65	34.62	0.753343	0.279227	0.792069	0.058869	0.022369
RIAU	7	2011	0.324	68.90	26.25	0.983812	0.296498	0.835493	0.380051	0.093969
RIAU	7	2012	0.383	69.15	30.28	0.732801	0.426883	1.610.244	0.489180	0.062491
RIAU	7	2013	0.393	69.91	32.98	1.743.743	0.639364	1.200.318	0.726631	0.038738
RIAU	7	2014	0.379	70.33	37.82	0.376274	0.518549	0.613464	0.820985	0.043738
RIAU	7	2015	0.366	70.84	44.43	1.810.687	0.657464	1.332.755	0.654220	0.079202
RIAU	7	2016	0.347	71.20	49.23	0.629399	0.709333	1.702.562	0.737745	1.454.358
RIAU	7	2017	0.325	71.79	58.41	3.157.985	0.865020	1.496.204	1.686.339	0.002975
RIAU	7	2018	0.347	72.44	68.73	2.973.018	0.759568	1.192.763	1.434.458	1.728.537
RIAU	7	2019	0.331	73.00	76.00	3.071.278	0.919416	1.022.580	1.548.579	2.005.072
RIAU	7	2020	0.321	72.71	80.61	3.726.278	1.141.955	1.392.236	1.603.292	2.187.666
RIAU	7	2021	0.327	72.94	86.45	3.446.558	0.923273	1.013.384	0.001504	2.080.322
RIAU	7	2022	0.323	73.52	91.01	2.428.596	1.203.330	0.389635	1.455.384	1.031.256
RIAU	7	2023	0.324	74.04	93.25	2.673.501	1.126.409	0.582193	1.506.322	1.064.604
BANTEN	8	2010	0.419	67.54	14.60	0.196481	0.227653	0.578138	0.381979	0.013661
BANTEN	8	2011	0.394	68.22	31.54	0.213118	0.270394	0.681412	0.460384	0.045180

BANTEN	8	2012	0.384	68.92	37.94	0.263163	0.268731	0.835011	0.530833	0.029687
BANTEN	8	2013	0.380	69.47	38.59	1.051.106	0.271466	0.695362	0.617081	0.014135
BANTEN	8	2014	0.424	69.89	43.14	0.286440	0.247610	0.769154	0.728490	0.016718
BANTEN	8	2015	0.386	70.27	48.15	1.545.959	0.412296	1.163.961	0.640981	0.020986
BANTEN	8	2016	0.392	70.96	55.43	0.408476	0.300096	1.189.816	0.693447	1.537.832
BANTEN	8	2017	0.379	71.42	64.11	3.329.905	0.386280	1.080.531	2.377.528	5.670.000
BANTEN	8	2018	0.367	71.95	75.39	3.603.844	0.359528	1.336.541	1.072.903	2.395.790
BANTEN	8	2019	0.361	72.44	82.25	3.922.492	0.595944	1.418.361	1.140.003	2.629.309
BANTEN	8	2020	0.365	72.45	84.07	4.851.593	1.019.801	1.280.676	1.159.302	2.734.752
BANTEN	8	2021	0.363	72.72	87.45	5.073.858	1.898.236	0.381640	1.105.866	2.655.967
BANTEN	8	2022	0.377	73.32	91.11	2.853.744	1.298.701	0.753964	1.071.260	1.146.891
BANTEN	8	2023	0.368	73.87	91.18	3.242.668	1.162.304	0.716323	1.108.754	1.192.352
SUMATERA BARAT	9	2010	0.325	67.25	30.00	0.192884	0.192839	0.399103	0.662699	0.019221
SUMATERA BARAT	9	2011	0.332	67.81	29.07	0.115961	0.230491	0.461791	0.764681	0.040733
SUMATERA BARAT	9	2012	0.355	68.36	33.13	0.126479	0.306393	0.661500	0.918560	0.032501
SUMATERA BARAT	9	2013	0.351	68.91	33.75	0.505268	0.236261	0.316527	1.039.923	0.064823

SUMATERA BARAT	9	2014	0.332	69.36	36.94	0.122249	0.437727	0.785018	1.129.886	0.054108
SUMATERA BARAT	9	2015	0.319	69.98	44.65	0.969453	0.456171	0.624884	1.221.129	0.062731
SUMATERA BARAT	9	2016	0.312	70.73	48.19	0.147375	0.638240	0.707593	1.261.916	1.212.490
SUMATERA BARAT	9	2017	0.312	71.24	54.91	1.922.225	0.609821	0.509188	1.764.826	0.075586
SUMATERA BARAT	9	2018	0.305	71.73	64.00	2.182.818	0.669678	0.536188	2.014.647	1.825.208
SUMATERA BARAT	9	2019	0.307	72.39	69.67	3.185.363	0.711590	0.486407	2.076.398	1.959.792
SUMATERA BARAT	9	2020	0.301	72.38	74.62	3.247.045	0.877334	0.504572	2.106.647	2.162.599
SUMATERA BARAT	9	2021	0.300	72.65	82.29	3.118.786	0.639324	0.055148	1.949.470	2.023.530
SUMATERA BARAT	9	2022	0.292	73.26	87.52	2.222.357	0.759531	0.223170	1.887.034	1.190.480
SUMATERA BARAT	9	2023	0.280	73.75	89.92	2.356.492	0.950772	0.203565	1.953.080	1.294.434
JAWA BARAT	10	2010	0.356	66.15	27.44	0.658591	0.381528	1.074.025	1.086.124	0.038570

JAWA BARAT	10	2011	0.380	66.67	28.24	3.209.851	0.415290	0.578591	1.181.553	0.045765
JAWA BARAT	10	2012	0.422	67.32	32.48	5.275.194	0.682504	0.950880	1.269.961	0.048356
JAWA BARAT	10	2013	0.406	68.25	32.57	5.734.764	0.741963	1.033.719	1.472.453	0.080072
JAWA BARAT	10	2014	0.398	68.80	37.47	6.483.296	0.838808	1.168.646	1.687.686	0.078215
JAWA BARAT	10	2015	0.426	69.50	44.67	7.544.583	0.934624	1.520.804	1.303.654	0.023630
JAWA BARAT	10	2016	0.402	70.05	49.43	1.224.969	1.169.219	1.398.850	1.247.046	7.747.404
JAWA BARAT	10	2017	0.393	70.69	62.04	7.979.214	0.872110	1.466.346	9.271.388	0.029691
JAWA BARAT	10	2018	0.405	71.30	70.61	1.342.947	0.958274	2.043.331	2.879.144	9.745.960
JAWA BARAT	10	2019	0.398	72.03	77.55	1.396.805	1.034.107	1.464.961	3.212.647	1.045.059
JAWA BARAT	10	2020	0.398	72.09	82.18	1.739.099	2.054.108	2.970.770	3.306.553	1.141.794
JAWA BARAT	10	2021	0.406	72.45	84.26	1.685.621	2.440.112	0.003515	3.107.450	1.132.501
JAWA BARAT	10	2022	0.412	73.12	87.57	7.622.512	1.288.070	0.514578	2.981.693	4.731.466
JAWA BARAT	10	2023	0.425	73.74	87.92	1.046.225	1.961.923	0.617134	3.298.968	5.033.720

Sumber : Kemendagri, Kemenkeu, Badan Pusat Statistik

Lampiran 2 Rank IPM 2010-2023

Provinsi	IPM	IPM	Peringkat
	2010	2023	
DKI JAKARTA	76,31	82,46	1
DI YOGYAKARTA	75,37	81,07	2
KALIMANTAN TIMUR	71,31	78,2	3
KEP. RIAU	71,13	77,11	4
BALI	70,1	77,1	5
SULAWESI UTARA	67,83	74,36	6
RIAU	68,65	74,04	7
BANTEN	67,54	73,87	8
SUMATERA BARAT	67,25	73,75	9
JAWA BARAT	66,15	73,74	10
SULAWESI SELATAN	66	73,46	11
ACEH	67,09	73,4	12
JAWA TENGAH	66,08	73,39	13
JAWA TIMUR	65,36	73,38	14
SUMATERA UTARA	67,09	73,37	15
KEP. BANGKA BELITUNG	66,02	72,85	16
SULAWESI TENGGARA	65,99	72,79	17
BENGKULU	65,35	72,78	18
JAMBI	65,39	72,77	19
KALIMANTAN SELATAN	65,2	72,5	20
KALIMANTAN UTARA	-	72,49	21
KALIMANTAN TENGAH	65,96	72,2	22
SUMATERA SELATAN	64,44	71,62	23
LAMPUNG	63,71	71,15	24
SULAWESI TENGAH	63,29	70,95	25
MALUKU	64,27	70,94	26
GORONTALO	62,65	70,45	27
MALUKU UTARA	62,79	70,21	28
NUSA TENGGARA BARAT	61,16	70,2	29
KALIMANTAN BARAT	61,97	69,41	30
SULAWESI BARAT	59,74	67,55	31
NUSA TENGGARA TIMUR	59,21	66,68	32
PAPUA BARAT	59,6	66,66	33
PAPUA	54,45	62,25	34

Sumber :Kemendagri, Badan Pusat Statistik

Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif

	GINI	IPM	PNET	PEND	KES	PFU	DAU	DAK
Mean	0.374479	73.51843	62.59771	3.360221	1.236254	1.364843	1.138148	1.204615
Median	0.373000	73.01000	64.05500	1.539721	0.524211	0.580392	1.026949	0.628393
Maximum	0.459000	82.46000	98.08000	22.95285	11.39459	15.43675	9.271388	11.41794
Minimum	0.280000	66.15000	14.60000	0.003080	0.004233	0.001694	0.001504	0.001129
Std. Dev.	0.041058	3.697807	23.21451	4.864367	2.219446	2.315608	0.993757	2.108979
Skewness	-0.037925	0.374469	-0.237074	2.293133	3.284134	3.535878	4.564495	3.226689
Kurtosis	2.167006	2.493235	1.789829	7.697887	13.21210	16.93526	35.89650	14.32267
Jarque-Bera	4.081191	4.770022	9.854419	251.4399	860.0038	1424.507	6361.787	934.1697
Probability	0.129951	0.092088	0.007247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	52.42700	10292.58	8763.680	470.4309	173.0755	191.0781	149.0973	159.0091
Sum Sq. Dev.	0.234315	1900.655	74908.98	3289.027	684.7060	745.3238	128.3819	582.6607
Observations	140	140	140	140	140	140	131	132

Sumber: Olah data oleh penulis, Eviews 10

Lampiran 4 Common Effect Model

Dependent Variable: RASIO_GINI_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/15/25 Time: 20:09

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 10

Total panel (unbalanced) observations: 127

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.293425	0.098297	-2.985090	0.0034
IPM	0.010358	0.001481	6.994436	0.0000
PNET	-0.001612	0.000240	-6.702460	0.0000
PEND	0.008270	0.002306	3.586915	0.0005
KES	-0.012545	0.005470	-2.293347	0.0236
PFU	-0.002868	0.004308	-0.665758	0.5069
DAU	0.000881	0.004144	0.212678	0.8319
DAK	-0.000867	0.002607	-0.332349	0.7402
R-squared	0.371959	Mean dependent var	0.371630	
Adjusted R-squared	0.335015	S.D. dependent var	0.041515	
S.E. of regression	0.033854	Akaike info criterion	-3.872598	
Sum squared resid	0.136385	Schwarz criterion	-3.693437	
Log likelihood	253.9100	Hannan-Quinn criter.	-3.799807	
F-statistic	10.06829	Durbin-Watson stat	0.668564	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah data oleh penulis, Eviews 10

Fixed Effect Model

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 01/16/25 Time: 13:43

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 10

Total panel (unbalanced) observations: 127

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.291075	0.310882	-0.936288	0.3512
IPM	0.010120	0.004713	2.147232	0.0340
PNET	-0.001343	0.000593	-2.265753	0.0254
PEND	0.001967	0.000837	2.350689	0.0205
KES	0.004314	0.006553	0.658296	0.5117
PFU	0.002894	0.003190	0.907288	0.3662
DAU	-0.001812	0.001337	-1.355228	0.1781
DAK	-0.000936	0.001103	-0.848690	0.3979

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.754718	Mean dependent var	0.371630
Adjusted R-squared	0.719040	S.D. dependent var	0.041515
S.E. of regression	0.022005	Akaike info criterion	-4.671062
Sum squared resid	0.053265	Schwarz criterion	-4.290344
Log likelihood	313.6124	Hannan-Quinn criter.	-4.516380
F-statistic	21.15392	Durbin-Watson stat	1.371993
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah data oleh penulis, Eviews 10

Random Effect Model

Dependent Variable: RASIO_GINI_Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/15/25 Time: 21:26

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 10

Total panel (unbalanced) observations: 127

Swamy and Arora estimator of component variances

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.212601	0.227634	-0.933961	0.3522
IPM	0.009004	0.003625	2.484163	0.0144
PNET	-0.001242	0.000489	-2.542112	0.0123
PEND	0.002531	0.000947	2.671763	0.0086
KES	-0.001694	0.002034	-0.832756	0.4067
PFU	0.000284	0.002530	0.112399	0.9107
DAU	-0.001485	0.001231	-1.206711	0.2299
DAK	-0.000621	0.001246	-0.498461	0.6191

Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.039414	0.7624
Idiosyncratic random			0.022005	0.2376

Weighted Statistics			
R-squared	0.211876	Mean dependent var	0.056485
Adjusted R-squared	0.165516	S.D. dependent var	0.026671
S.E. of regression	0.021692	Sum squared resid	0.055994
F-statistic	4.570212	Durbin-Watson stat	1.304173
Prob(F-statistic)	0.000150		

Unweighted Statistics			
-----------------------	--	--	--

R-squared	0.251855	Mean dependent var	0.371630
Sum squared resid	0.162467	Durbin-Watson stat	0.449483

Sumber : Olah data oleh penulis, Eviews 10

Lampiran 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.072561	(9,110)	0.0000
Cross-section Chi-square	119.404843	9	0.0000

Sumber : Olah data oleh penulis, Eviews 10

Lampiran 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	7	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

** WARNING: robust standard errors may not be consistent with assumptions of Hausman test variance calculation.

Sumber : Olah data oleh penulis, Eviews 10

Lampiran 7 Hasil Model Terbaik Random Effect (REM)

Dependent Variable: RASIO_GINI_Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/15/25 Time: 21:26

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 10

Total panel (unbalanced) observations: 127

Swamy and Arora estimator of component variances

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.212601	0.227634	-0.933961	0.3522

IPM	0.009004	0.003625	2.484163	0.0144
PNET	-0.001242	0.000489	-2.542112	0.0123
PEND	0.002531	0.000947	2.671763	0.0086
KES	-0.001694	0.002034	-0.832756	0.4067
PFU	0.000284	0.002530	0.112399	0.9107
DAU	-0.001485	0.001231	-1.206711	0.2299
DAK	-0.000621	0.001246	-0.498461	0.6191

Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.039414	0.7624
Idiosyncratic random			0.022005	0.2376

Weighted Statistics			
R-squared	0.211876	Mean dependent var	0.056485
Adjusted R-squared	0.165516	S.D. dependent var	0.026671
S.E. of regression	0.021692	Sum squared resid	0.055994
F-statistic	4.570212	Durbin-Watson stat	1.304173
Prob(F-statistic)	0.000150		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.251855	Mean dependent var	0.371630
Sum squared resid	0.162467	Durbin-Watson stat	0.449483

Sumber : Olah data oleh penulis, Eviews 10

